

**KEBIJAKAN KEAMANAN DIGITAL AMERIKA SERIKAT ERA
KEPEMIMPINAN JOE BIDEN
(STUDI KASUS PEMBLOKIRAN APLIKASI TIKTOK)**

Diajukan Guna Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan Untuk
Meraih Gelar Kesarjanaan Strata-1 (S1) Pada Fakultas Hukum, Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah
Sorong Dengan Spesialisasi Hubungan Internasional



DISUSUN OLEH:
SYAHRI SAFRI SEKNUN
NIM. 146420121020

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

KEBIJAKAN KEAMANAN DIGITAL AMERIKA SERIKAT ERA KEPEMIMPINAN JOE BIDEN

(STUDI KASUS PEMBLOKIRAN APLIKASI TIKTOK)

Nama : Syahri Safri Seknun

NIM : 146420121020

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Pada 07 Januari 2026

Pembimbing I

Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201



(.....)

Pembimbing II

Etik Siswati Ningrum, S,IP, M.H.I
NIDN. 1409018401



(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN KEAMANAN DIGITAL AMERIKA SERIKAT ERA KEPEMIMPINAN JOE BIDEN (STUDI KASUS PEMBLOKIRAN APLIKASI TIKTOK)

Nama : Syahri Safri Seknun

NIM : 146420121020

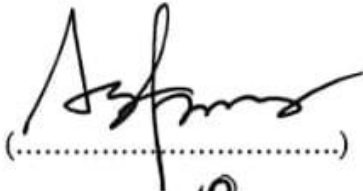
Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Sorong, 07 Januari 2026


Dekan FTHISIPOL
Agfajrina Cindra pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201


(.....)

2. Etik Siswati Ningrum, S.IP., M.H.I.
NIDN. 1409018401


(.....)

3. Nurinaya, M.H.I.
NIDN. 1417129501


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahri Safri Seknun
NIM : 146420121020
Judul penelitian : Kebijakan Keamanan Digital Amerika Serikat Era
Kepemimpinan Joe Biden
(Studi Kasus Pemblokiran Aplikasi Tiktok)

Menyetakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan data penulisan atau pikiran orang lain, kecuali dengan mencantumkan sumber kutipan pada daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun hukum atas perbuatan tersebut.

Sorong, 07 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Syahri Safri Seknun
NIM. 146420121020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Apapun yang terjadi jangan pernah lupa sholat, mengaji, dan belajar
(Kaim Seknun)

PERSEMBAHAN

pada kesempatan ini, penulis mengucapkan puji dan Syukur kepada allah swt. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan Bahagia penulis ucapkan rasa Syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan-Nya, penulis tidak akan mempunyai kekuatan untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtua penulis yang tercinta, Almarhum bapak Kaim Seknun dan mama Risna Ayub yang merupakan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa tulus memberikan motivasi, doa, kasih sayang, keikhlasan, kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik moril dan materil dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
3. Almarhum bapak Karim Seknun dan mama Dince Ayub, yang menjadi salah satu motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah memberikan dukungan berupa motivasi, perhatian hingga doa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakak dan adik penulis, Zahra Mufida Seknun, Nurhaliza Keliobas, Khumaira Altafunnisa Seknun, dan Badaruddin Zain Seknun, yang telah memberikan nasehat, kasih sayang, dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Kakak sepupu penulis, abang Ali Zainal Abidin Seknun, abang Muslim Muhaimin Seknun, kakak Amalia Karim Seknun dan kakak Dinda Maharani Seknun, yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama masa studi penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh teman seangkatan penulis di jurusan Hubungan Internasional (Desi Natalia, Safira Maharani, Diana Warmasen, Maisyaro Kalauw, Jenny Laurens, Dita Nurul, Kevin Runaki, Ross Alifano, Putri Fajar, Laili Mufidatul Dan Gita Bhayangkari), terima kasih banyak atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. FC Barcelona, sebagai klub sepak bola favorit penulis sejak kecil. Terima kasih telah mengajarkan penulis tentang arti sebuah perjuangan dan kesabaran untuk menggapai suatu tujuan. Terima kasih juga telah memberikan permainan dan hasil terbaik di musim ini yang sangat berpengaruh dalam memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *Visca barca visca catalonia.*

ABSTRAK

Akibat dari permasalahan aplikasi Tiktok di Amerika Serikat, presiden Joe Biden membuat kebijakan untuk memblokir aplikasi Tiktok di Amerika Serikat. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses sekuritisasi dalam kebijakan keamanan digital pemerintahan Joe Biden mendorong kebijakan pemblokiran Tiktok di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, teori yang digunakan adalah teori sekuritisasi dari Ole Wæver. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemblokiran aplikasi Tiktok pada masa pemerintahan Joe Biden merupakan hasil dari proses sekuritisasi dalam kebijakan keamanan digital, di mana Tiktok dikonstruksi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional melalui narasi keamanan data dan pengaruh asing. Keberhasilan konstruksi ancaman tersebut memperoleh legitimasi audiens dan mendorong pemerintah mengambil tindakan luar biasa berupa pembatasan dan pemblokiran penggunaan Tiktok di lingkungan pemerintah Amerika Serikat.

Kata Kunci: Keamanan Digital, Pemblokiran Tiktok, Joe Biden, Proses Sekuritisasi, Amerika Serikat

ABSTRACT

As a result of the issues surrounding the Tiktok application in the United States, President Joe Biden implemented policies to restrict and block the use of Tiktok in the country. The purpose of this study is to analyze how the process of securitization within the digital security policy of the Joe Biden administration has driven the policy of blocking Tiktok in the United States. This research employs a qualitative method with a literature study approach, using securitization theory developed by Ole Wæver as the main analytical framework. The findings of this study indicate that the policy to block the Tiktok application during the Joe Biden administration is the result of a securitization process in digital security policy, in which Tiktok is constructed as a threat to national security through narratives of data security and foreign influence. The successful construction of this threat gained audience legitimacy and encouraged the government to adopt extraordinary measures in the form of restrictions and the blocking of Tiktok usage within the United States government environment.

Keywords: *Digital Security, Tiktok Ban, Joe Biden, Securitization Process, United States.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Kebijakan Keamanan Digital Amerika Serikat Era Kepemimpinan Joe Biden (Studi Kasus Pemblokiran Aplikasi Tiktok)”. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar S1 pada program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat berkontribusi bagi ilmu hubungan internasional, khususnya dalam kajian mengenai keamanan digital. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Politik sekaligus dosen pembimbing 1 dan ketua penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan bantuan. Terima kasih telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Etik Siswati Ningrum, M.H.I. selaku Ketua Prodi Hubungan Internasional sekaligus dosen pembimbing 2 dan penguji 1 yang telah memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih juga atas pembelajaran yang diberikan baik selama bimbingan maupun perkuliahan.
3. Ibu Nurinaya, M.H.I. selaku penguji 2 sekaligus dosen program studi hubungan internasional yang telah memberikan banyak masukan dan saran. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Pak Try Danuwijaya, M.H.I. selaku dosen hubungan internasional. Terima kasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh staf FHISIPOL, terima kasih telah membantu penulis dalam penyiapan berkas selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
6. Kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan masukan, motivasi, dukungan dan doa. Semoga tuhan membalas ketulusan hati dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak yang positif bagi para pembaca karena dalam skripsi ini memuat banyak pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian. Dalam hal ini, penulis tidak menutup kemungkinan untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik.

Sorong, Januari 2026
Penulis,

Syahri Safri Seknun
NIM.146420121020

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Tinjauan Pustaka.....	6
1.5 Kerangka Dasar Pemikiran.....	12
1.5.1 Securitization	12
1.5.2 Keamanan Nasional.....	14
1.5.3 Kebijakan Publik	16
1.6 Metodologi Penelitian.....	18
1.6.1 Jenis Penelitian	18
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.3 Teknik Analisis Data	19
1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian	19
1.7 Argumen Dasar.....	20
1.8 Sistematika Penulisan	20
BAB II SEJARAH MASUKNYA APLIKASI TIKTOK DI AMERIKA SERIKAT	21
2.1 Perkembangan Tiktok di Global.....	22
2.2 Masuknya Tiktok di Amerika Serikat.....	24
2.3 Pengguna Aplikasi Tiktok di Amerika Serikat	26
2.4 Permasalahan Tiktok di Amerika Serikat	28

2.4.1 Kasus Konten “ <i>Devious Lick</i> ” yang Terjadi di Kalangan Muda Amerika Serikat.....	28
2.4.2 Kasus Bunuh Diri Remaja 16 Tahun Akibat Alogaritma Tiktok di Long Island.....	29
2.4.3 Penyebaran Hoaks Dan Disinformasi Menjelang Pemilu Amerika Serikat 2024	30
2.4.4 Pelacakan Lokasi Jurnalis Amerika Serikat Oleh Karyawan ByteDance.....	31
2.4.5 Kasus <i>Slap a Teacher</i> Di Amerika Serikat Pada 2021.....	32
BAB III KEBIJAKAN KEAMANAN DIGITAL PRESIDEN JOE BIDEN DALAM PERMASALAHAN TIKTOK DI AMERIKA SERIKAT	37
3.1 Kebijakan Presiden Joe Biden dalam Permasalahan Tiktok di Amerika Serikat.....	37
3.1.1 Perintah Eksekutif 14034 (2021).....	37
3.1.2 Kebijakan No Tiktok on Government Devices Act.....	38
3.1.3 Kebijakan The Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACA).....	40
3.2 Tindakan Kementerian Perdagangan Terkait Perintah Eksekutif Presiden Joe Biden	41
3.3 Kerjasama Antara Tiktok Dan Walmart	42
3.4 Persaingan Tiktok Dengan Perusahaan Teknologi Amerika Serikat ..	43
3.4.1 Strategi Meta Menghadapi Dominasi Tiktok Di Pasar Amerika Serikat....	43
3.4.2 Youtube Short Sebagai Bentuk Strategi Youtube Melawan Tiktok.....	46
3.5 Sidang Antara Komite Energi dan Perdagangan Dengan CEO Tiktok....	47
3.6 Aturan Pemerintah Amerika Serikat yang Dilanggar Aplikasi Tiktok	48
3.6.1 Aturan Mengenai Privasi Anak-Anak Dibawah 13 Tahun	48
3.6.2 Tiktok Melanggar Aturan Dari CFIUS	49
3.6.3 Algoritma Tiktok Bertentangan Dengan Prinsip <i>Digital Transparency and Accountability</i>	50
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN DIGITAL JOE BIDEN TERHADAP PEMBLOKIRAN TIKTOK BERDASARKAN TEORI SEKURITISASI.....	52

4.1 Kebijakan Keamanan Digital Presiden Joe Biden.....	52
4.2 Proses Sekuritisasi Aplikasi Tiktok	53
4.2.1 Speech Act	53
4.2.2 Audiens Acceptance	54
4.2.3 Referent Object.....	54
4.2.4 Extraordinary Measures.....	55
4.3 Kebijakan Keamanan Digital Terhadap Pemblokiran Aplikasi Tiktok... ..	55
4.4 Hubungan Proses Sekuritisasi Dengan Kebijakan Pemblokiran Aplikasi Tiktok	57
4.5 Pemblokiran Aplikasi Tiktok Sebagai Bagian Dari Proses Sekuritisasi.....	58
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.1 Permasalahan Tiktok Pada Masa Joe Biden.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Data Pengguna Tiktok Berdasarkan Usia di Amerika Serikat.....	27
Gambar 2.2	Diagram Data Pengguna Tiktok Amerika Serikat Berdasarkan Gender 27	
Gambar 2.3	Presentase Pertumbuhan Tiktok Tahunan di Amerika Serikat	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial saat ini telah memiliki peran yang sangat penting di Masyarakat seperti berbagai kegiatan pertukaran informasi dan mencari informasi yang dinilai lebih cepat dan mudah, dan pada saat ini media sosial dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan bukan hanya keperluan sendiri tetapi keperluan banyak orang seperti keperluan organisasi, korporasi, pemerintahan, hingga lembaga sosial Masyarakat (jing zhou , silin ye , xiaming liu 2024). Hal inilah yang menjadi bukti bahwa media sosial telah menjadi kebutuhan primer semua orang sebagai alat komunikasi, sehingga keberadaan media sosial sangat digemari oleh kalangan masyarakat Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, maupun golongan lanjut usia. Media sosial sering dimanfaatkan oleh sebuah organisasi maupun instansi pemerintah karena penggunaan media sosial sendiri menjadi salah satu cara untuk menyebarluaskan informasi positif, dan dapat juga untuk mempromosikan terkait program, kegiatan serta kinerja kerja masing-masing yang akhirnya bisa mendapat opini yang baik di Masyarakat (Alenzi and Miskon 2024).

Media sosial yang telah berkembang menjadi platform digital yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem yang menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi, perilaku pengguna, serta pola interaksi sosial. Pengelolaan data berskala besar ini menimbulkan berbagai resiko, seperti kebocoran data, pelanggaran privasi, manipulasi informasi, serta potensi penyalagunaan algoritma untuk mempengaruhi opini publik (epic 2025). Selain itu, kepemilikan dan pengelolaan platform media sosial oleh perusahaan asing juga memunculkan kekhawatiran akan adanya pengaruh dan intervensi asing terhadap masyarakat dan stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, media sosial tidak lagi dipandang semata-mata sebagai isu teknologi atau ekonomi, melainkan telah bergeser menjadi bagian dari isu keamanan digital dan bahkan keamanan nasional (Paulo 2024).

Tiktok muncul sebagai salah satu platform media sosial paling populer di dunia dengan pengguna 1.5 miliar yang terus meningkat secara signifikan (Anderson 2024), termasuk di Amerika Serikat yang memiliki 113 juta pengguna

(ravpreet kaur 2024). Aplikasi berbagi video pendek ini banyak digunakan oleh berbagai kelompok usia dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, baik sebagai sarana hiburan, ekspresi diri, maupun penyebaran informasi. Tingginya tingkat pengguna TikTok di Amerika Serikat menjadikan platform ini memiliki pengaruh sosial yang luas, sekaligus menempatkannya dalam posisi strategis dalam ekosistem digital nasional (Eddy 2024).

Namun, popularitas TikTok tidak terlepas dari berbagai kontroversi, terutama terkait kepemilikannya oleh perusahaan ByteDance yang berbasis di Tiongkok. Kondisi ini memicu kekhawatiran di negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, mengenai keamanan data dan privasi pengguna, mengingat potensi akses pemerintah asing terhadap data warga negara (euronews 2025). Selain itu, muncul pula kekhawatiran bahwa algoritma TikTok dapat dimanfaatkan sebagai sarana manipulasi informasi atau pengaruh politik asing. Dalam konteks tersebut, TikTok tidak lagi dipandang sekadar sebagai aplikasi hiburan, melainkan mulai diposisikan sebagai isu sensitif yang berkaitan dengan keamanan digital dan keamanan nasional Amerika Serikat (Kari Paul 2022).

Pada era kepemimpinan presiden Joe Biden, aplikasi TikTok dipandang sebagai isu yang memerlukan perhatian serius dalam konteks keamanan digital dan keamanan nasional. Presiden Joe Biden dan para pejabat keamanan Amerika Serikat menyoroti kekhawatiran terkait potensi spionase, akses tidak sah terhadap data pengguna, serta kemungkinan manipulasi informasi dan opini publik melalui algoritma platform tersebut (Press 2024). Kekhawatiran ini diperkuat oleh kepemilikan TikTok oleh ByteDance yang berbasis di Tiongkok, yang dianggap dapat membuka celah bagi pengaruh pemerintah asing terhadap data warga negara Amerika Serikat. Dalam berbagai pernyataan resmi dan dokumen kebijakan, TikTok mulai dibingkai bukan hanya sebagai isu teknologi atau ekonomi, melainkan sebagai ancaman potensial terhadap kepentingan keamanan nasional (Reuters 2024).

Peningkatan kasus di dunia maya di Amerika Serikat juga menjadi faktor presiden Joe Biden melakukan kebijakan tersebut. Menurut laporan dari *Federal Bureau of Investigation* (FBI 2022), kasus *cyber crime* seperti kebocoran data, dan pencurian identitas yang terjadi di Amerika Serikat meningkat pada tahun 2021

Sehingga presiden Joe Biden membuat kebijakan untuk tetap memperhatikan kejahatan di dunia maya termasuk permasalahan Tiktok. Dalam konteks ini, Tiktok mulai dikaitkan dengan berbagai potensi ancaman, khususnya terkait keamanan data pengguna dan kemungkinan pengaruh asing terhadap ruang digital domestik (FALLON 2024). Kekhawatiran terhadap akses tidak sah atas data, manipulasi algoritma, serta potensi eksploitasi platform untuk kepentingan politik asing mendorong pemerintah dan lembaga keamanan Amerika Serikat membingkai Tiktok sebagai lebih dari sekadar aplikasi media sosial. Melalui narasi ancaman yang berkembang, Tiktok diposisikan sebagai risiko strategis yang dapat mengancam kedaulatan digital dan stabilitas nasional, sehingga diperlakukan sebagai ancaman yang memerlukan respons keamanan yang tegas dari negara (FALLON 2024).

Sebagai respons atas kekhawatiran tersebut, pemerintahan Joe Biden mengeluarkan serangkaian kebijakan keamanan digital yang secara bertahap membatasi aktivitas Tiktok di Amerika Serikat. Kebijakan pertama adalah *Executive Order 14034* yang diterbitkan pada 9 Juni 2021 dengan judul *Protecting Americans' Sensitive Data from Foreign Adversaries*. Perintah eksekutif ini mencabut kebijakan larangan sepihak terhadap Tiktok yang dikeluarkan pada era Presiden Donald Trump, sekaligus mengubah pendekatan pemerintah Amerika Serikat dalam menangani isu keamanan aplikasi asing (Biden 2021). Melalui kebijakan ini, pemerintahan Joe Biden menekankan mekanisme penilaian risiko yang lebih terstruktur dengan melibatkan Departemen Perdagangan serta lembaga keamanan nasional terkait, khususnya dalam menilai potensi ancaman terhadap data sensitif dan keamanan nasional (Biden 2021).

Pendekatan tersebut kemudian diperkuat melalui pengesahan *No Tiktok on Government Devices Act* pada Desember 2022. Undang-undang ini melarang penggunaan aplikasi Tiktok pada seluruh perangkat elektronik milik pemerintah federal Amerika Serikat. Kebijakan ini secara spesifik menargetkan lingkungan internal pemerintahan yang dianggap rentan terhadap kebocoran data dan akses tidak sah (Young 2023). Meskipun tidak melarang penggunaan Tiktok oleh masyarakat umum, kebijakan ini menunjukkan adanya upaya negara dalam

melindungi sistem informasi dan jaringan pemerintah dari potensi ancaman keamanan digital yang berasal dari platform asing.

Selanjutnya, pada April 2024, Presiden Joe Biden menandatangani *Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACA)*. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi atau melarang aplikasi yang berada di bawah kendali musuh asing. Dalam konteks Tiktok, kebijakan ini menetapkan kewajiban divestasi kepemilikan ByteDance atas Tiktok di Amerika Serikat. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah memiliki kewenangan untuk melarang operasional Tiktok secara nasional (Paulo 2024). Dengan demikian, PAFACA menandai eskalasi kebijakan dari pembatasan administratif menuju mekanisme hukum yang memungkinkan tindakan pemblokiran.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Joe Biden secara konsisten membingkai Tiktok sebagai isu keamanan nasional, khususnya dalam sektor keamanan digital (Service 2023). Kekhawatiran terhadap perlindungan data, pengaruh asing, serta meningkatnya kejahatan siber memperkuat narasi bahwa keberadaan Tiktok dapat mengancam kepentingan strategis Amerika Serikat (Release 2024). Narasi ini kemudian memperoleh legitimasi melalui dukungan lembaga legislatif, lembaga keamanan, serta opini publik yang semakin menerima Tiktok sebagai sumber potensi ancaman. Pemblokiran aplikasi Tiktok merupakan bagian dari kebijakan keamanan digital karena dilakukan sebagai upaya negara dalam melindungi keamanan data, privasi pengguna, dan kedaulatan digital dari potensi ancaman teknologi asing. Dalam konteks Amerika Serikat, kebijakan pembatasan dan pemblokiran Tiktok mencerminkan respons negara terhadap konstruksi Tiktok sebagai ancaman keamanan nasional, sehingga mendorong diambilnya langkah-langkah luar biasa dalam kerangka keamanan digital.

Dalam konteks ini, kebijakan keamanan digital terhadap Tiktok dapat dipahami sebagai bagian dari proses sekuritisasi, di mana suatu isu non-militer dikonstruksi sebagai ancaman keamanan nasional. Pemerintah Amerika Serikat, melalui pernyataan resmi dan kebijakan hukum, berperan sebagai aktor yang membingkai Tiktok sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Penerimaan

narasi tersebut oleh audiens memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan luar biasa berupa pembatasan dan pemblokiran penggunaan Tiktok, khususnya di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan pemblokiran Tiktok pada era pemerintahan Joe Biden tidak berdiri sebagai kebijakan teknis semata, melainkan merupakan hasil dari proses sekuritisasi dalam kebijakan keamanan digital Amerika Serikat.

Pemblokiran Tiktok oleh pemerintah Amerika Serikat telah memicu perbincangan internasional mengenai keamanan digital dan regulasi platform asing. Negara-negara lain mempertimbangkan langkah serupa untuk melindungi data dan keamanan nasional mereka, yang menimbulkan perdebatan tentang batasan kebebasan digital dan pengawasan teknologi asing (Bernot, Cooney-O'donoghue, and Mann 2024). Oleh karena itu, Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena kebijakan terhadap Tiktok pada era pemerintahan Joe Biden menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan yang diambil pada masa pemerintahan Donald Trump. Jika pada era sebelumnya isu Tiktok cenderung diperlakukan sebagai persoalan kebijakan yang bersifat sementara dan politis, maka pada era Joe Biden Tiktok semakin diposisikan sebagai bagian dari agenda keamanan digital jangka panjang. Hal ini menandakan bahwa Tiktok tidak lagi dipahami sebagai isu teknis atau kebijakan sesaat, melainkan sebagai tantangan struktural terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap proses sekuritisasi yang mendorong lahirnya kebijakan pemblokiran Tiktok, bukan semata-mata pada kebijakan itu sendiri, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi ancaman keamanan digital dalam kebijakan pemerintahan Joe Biden.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah **“Bagaimana proses sekuritisasi dalam kebijakan keamanan digital pemerintahan Joe Biden mendorong pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat?”**

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan

- 1) Untuk menganalisis Bagaimana proses sekuritisasi dalam kebijakan keamanan digital pemerintahan Joe Biden mendorong kebijakan pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat

b) Manfaat

- 1) Memberikan kontribusi terhadap literatur akademik dibidang keamanan nasional, geopolitik, dan kebijakan teknologi
- 2) Memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh pemerintah, menyusu keamanan, dan organisasi internasional untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait keamanan digital dan perlindungan data

1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian Rahmadhaniah Putri Ichwan (2023) Berjudul “Sekuritisasi Tiktok di Amerika Serikat di Masa Pemerintahan Donald Trump pada Tahun 2020”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang tindakan pelarangan Tiktok di Amerika Serikat dimasa pemerintahan Donald Trump (Ichiwan and Nursita, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengenai pelarangan aplikasi Tiktok di Amerika Serikat ditunda pemblokirannya yang dikarenakan pelaksanaannya berhimpitan dengan agenda pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2020. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian ini berfokus pada sekuritisasi Amerika Serikat pada masa pemerintahan presiden Donald Trump, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ialah berfokus pada perbandingan kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump dan Joe Biden dalam pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat.

Penelitian Wyanne Teresita Saputra (2021) Berjudul “Implikasi Kebijakan Pemblokiran Aplikasi Tiktok Oleh Amerika Serikat Terhadap Hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat Disektor Keamanan Ruang Siber ByteDance Tiongkok”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implikasi

dari adanya pemblokiran aplikasi Tiktok tersebut terhadap hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat dapat mempengaruhi perang siber yang sudah terjadi, terlebih pada hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok pada keamanan dan ruang siber mereka (Saputra 2021). Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian ini berfokus pada dampak pemblokiran aplikasi Tiktok terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat dan Tiongkok di bidang keamanan siber, sedangkan penelitian yang diteliti berfokus pada perbandingan kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump dan Joe Biden dalam membuat kebijakan terhadap pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat.

Penelitian Rahmat Gunawan Frandono (2023) Berjudul “Motivasi Amerika Serikat Memberikan Prasyarat Pada ByteDance Atas Kasus Pemblokiran Tiktok”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk Untuk analisis motivasi Amerika Serikat dalam memberikan prasyarat kepada ByteDance atas kasus pemblokiran Tiktok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek ekonomi dan aspek politik yang mendasari pemberian prasyarat oleh pemerintah Amerika Serikat, dengan Tiktok sebagai salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan suara masyarakat dan pembangunan citra oleh politisi (Frandono 2023). Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini membahas mengenai motivasi Amerika Serikat memberikan prasyarat kepada ByteDance selaku Perusahaan induk Tiktok atas kasus pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih berfokus kepada perbandingan kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump dan Joe Biden dalam pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat.

Penelitian Zidan Maulidan Swanda Yang Berjudul “Amerika Serikat Vs Tiktok: Sebuah Analisis melalui Prespektif Neorealisme”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis perseteruan antara Amerika Serikat dan Tiktok melalui prespektif neorealisme, dengan fokus pada Tindakan pemblokiran yang

dilakukan Amerika Serikat terhadap Tiktok (Swanda 2023), Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perseteruan antara Amerika Serikat dan Tiktok dapat dipahami melalui prespektif neorealisme dalam hubungan internasional. Pemblokiran yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiktok dapat diinterpretasikan sebagai Tindakan defensive untuk menghalau potensi ancaman dari Tiktok (Swanda 2023). Pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini berfokus kepada pemblokiran Tiktok di Amerika Serikat dalam prespektif neorealisme sebagai ideologi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih berfokus kepada perbandingan kebijakan Donald Trump dan Joe Biden dalam pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat.

Penelitian Irma Indrayani Dan Tasya Maharani Yang Berjudul “The United State’s National Security Protection From Cyber Crime Threats A Case Study Of Tik Tok Banning Submission By The President Donald Trump In 2020”. metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan kebenaran klaim Donald Trump mengenai Tiktok, serta kemungkinan aplikasi Tiktok digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan siber. Dengan fokus pada penelitian ini adalah kemungkinan pencurian dan penjualan data pengguna Tiktok kepada layanan intelijen nasional Tiongkok, yang dituduhkan oleh Donald Trump terkait dengan adanya undang-undang intelijen nasional Tiongkok. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat kemungkinan ancaman terhadap keamanan nasional yang ditimbulkan oleh aplikasi Tiktok, terutama terkait pengumpulan data pengguna yang dapat disalurkan kepada Tiongkok Sesuai dengan undang-undang intelijen Tiongkok yang mengharuskan Perusahaan untuk melibatkan layanan intelijen dalam oprasional mereka. Hingga keputusan pemblokiran aplikasi Tiktok yang dianggap tepat melalui prespektif keamanan nasional (irma indrayanti 2022). Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian ini berfokus pada kebijakan Donald Trump dalam pemblokiran Tiktok di Amerika Serikat berdasarkan prespektif keamanan nasional. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih berfokus pada

perbandingan kebijakan yang diambil presiden Donald Trump dan Joe Biden dalam pemblokiran Tiktok di Amerika Serikat.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Penulis, Tahun Terbit, Penerbit	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sekuritisasi Tiktok di Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump pada tahun 2020, rahmadhaniah putri ichwan, 2023, skripsi internasional, universitas islam indonesia	Untuk mengetahui latar belakang tindakan pelarangan Tiktok di Amerika Serikat dimasa pemerintahan Donald Trump	Metode penelitian kualitatif dengan jenis studi literatur	Kebijakan pelarangan aplikasi Tiktok ditunda yang dikarenakan berhimpitan dengan agenda pemilihan presiden Amerika Serikat pada November 2020
2	Implikasi kebijakan pemblokiran aplikasi Tiktok oleh Amerika Serikat terhadap hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat disektor keamanan ruang siber: ByteDance, Tiongkok, wyanne teresita saputra,2021, skripsi hubungan internasional,	Menjelaskan bagaimana implikasi dari adanya pemblokiran aplikasi Tiktok tersebut terhadap hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.	Metode penelitian kualitatif jenis penelitian eksploratif	Kebijakan pemblokiran aplikasi Tiktok dapat memperkeruh perang siber yang sudah terjadi terlebih pada hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok pada keamanan ruang siber mereka.

	universitas pembangunan nasional veteran jakarta.			
3	Motivasi Amerika Serikat memberikan prasyarat pada ByteDance atas kasus pemblokiran Tiktok, Rahmat Gunawan frandono, 2023, skripsi hubungan internasional, universitas andalas	Untuk analisis motivasi Amerika Serikat dalam memberikan prasyarat kepada ByteDance atas kasus pemblokiran Tiktok	Metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data studi pustaka	Terdapat aspek ekonomi dan aspek politik yang mendasari pemberian prasyarat oleh pemerintah Amerika Serikat, dengan Tiktok sebagai salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan suara masyarakat dan pembangunan citra oleh politisi.
4	Amerika Serikat vs Tiktok: sebuah analisis melalui prespektif neorealisme, Zidan maulidan swanda, departemen hubungan internasional	Untuk menganalisis persetujuan antara Amerika Serikat dan Tiktok melalui prespektif neorealisme, dengan fokus	Metode kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persetujuan antara amerika serkat dan Tiktok dapat dipahami melalui prespektif

	universitas airangga 2023	pada Tindakan pemblokiran yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Tiktok		neorealisme dalam hubungan internasional. Pemblokiran yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiktok dapat diinterpretasikan sebagai Tindakan defensif untuk menghalau potensi ancaman dari Tiktok
5	<i>The United State's National Security Protection From Cyber Crime Threats A Case Study of Tik Tok Banning Submission by the President Donald Trump In 2020</i> , Irma Indrayani, Tasya Maharan, Universitas Nasional Jakarta	untuk menganalisis dan mengevaluasi klaim yang diajukan oleh Donald Trump mengenai potensi ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh aplikasi Tiktok	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat, hal ini terkait karena undang-undang Tiongkok yang mengharuskan Perusahaan untuk melibatkan intelijen dalam oprasional mereka. penelitian ini juga

				menemukan bahwa jika Amerika Serikat memblokir Tiktok, dan kemungkinan negara lain juga akan mengikutinya.
--	--	--	--	--

1.5 Kerangka Dasar Pemikiran

1.5.1 *Securitization*

Securitization merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh *Copenhagen school*, dan merupakan salah satu pendekatan yang cukup berpengaruh dalam studi keamanan modern, terutama terhadap isu-isu yang awalnya bersifat aman dapat dibuat menjadi suatu hal yang mengancam keamanan. Menurut *copenhagen school* dalam buku yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis (1998)*, keamanan tidak lagi dipandang sebagai suatu fenomena yang hanya berkaitan dengan ancaman militer, tetapi merupakan sebuah isu yang dinaikkan statusnya hingga dipersepsikan menjadi suatu ancaman oleh aktor politik sehingga ancaman terhadap isu tersebut dianggap penting (Barry Buzan, Ole Wæfer 1998). Ole Wæver menjelaskan bahwa *securitization* memiliki empat proses yaitu:

1. *Speech act* yaitu pernyataan atau wacana yang diberikan oleh aktor sekuritisasi untuk membingkai suatu isu sebagai sebuah ancaman yang membutuhkan perhatian khusus.
2. *Audiens acceptance* yang merupakan proses dimana audiens seperti public atau instansi diyakinkan dan menerima bahwa isu yang dibingkai memang suatu ancaman yang serius dan memerlukan suatu tindakan.
3. *Referent object* yaitu apa yang dianggap perlu dilindungi dari ancaman tersebut, seperti negara, bangsa atau identitas.

4. *Extraordinary measures* yaitu tindakan luar biasa yang diambil oleh aktor sekuritisasi setelah isu tersebut dikonstruksi sebagai ancaman keamanan.

Ole Wæver menekankan bahwa sekuritisasi hanya berhasil jika aktor politik mampu memperoleh legitimasi dan mengubah persepsi audiens sehingga isu tersebut dianggap sebagai ancaman yang mendesak. Namun proses tersebut juga dapat gagal jika audiens tidak menerima framing ancaman yang diajukan. Oleh karena itu, keberhasilan sekuritisasi tidak hanya ditentukan oleh *speech act* yang dilakukan oleh aktor politik, tetapi juga oleh audiens dan kondisi politik yang mempengaruhi proses tersebut (Wæver 2002). Audiens dalam teori sekuritisasi merupakan suatu elemen yang penting karena mereka yang memberikan legitimasi atas pengakuan isu sebagai ancaman keamanan yang membutuhkan tindakan luar biasa. Audiens dalam teori sekuritisasi terdiri dari berbagai kelompok yaitu publik umum, Lembaga legislatif, Lembaga eksekutif, pengadilan hingga media (Barry Buzan, Ole Wæver 1998).

Dengan demikian *securitization* merupakan proses yang mana aktor pemerintah dan audiens memiliki pandangan yang sama dalam sebuah isu (Wæver 2002). *Copenhagen school* juga menjelaskan bahwa Tindakan serius yang dilakukan oleh aktor pemerintah hanya bisa dilakukan jika audiens memberikan legitimasi secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan serius yang dilakukan oleh aktor tersebut dapat berupa penerapan larangan, pemblokiran, atau penggunaan instrumen ekonomi maupun politik (Barry Buzan, Ole Wæver 1998).

Dalam penelitian ini, teori sekuritisasi akan sangat membantu untuk memahami bagaimana pemerintah Joe Biden membuat isu TikTok menjadi sebuah ancaman bagi keamanan digital Amerika Serikat. Pada era presiden Joe Biden, proses *securitization* dilakukan dengan pendekatan yang lebih berbasis aturan dan evaluasi. Kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh Joe Biden ialah membatalkan perintah eksekutif Donald Trump dan menggantinya dengan perintah eksekutif yang baru yang meminta departemen perdagangan untuk meninjau resiko aplikasi asing lebih menyeluruh (Freifeld

2021). Presiden Joe Biden juga mengesahkan undang-undang PAFACA yang memberikan wewenang besar untuk presiden memblokir aplikasi yang dikuasai oleh negara musuh (House 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa *sekuritization* pada era Joe Biden dilakukan dengan mekanisme hukum dan institusional, tidak dengan pendekatan yang langsung seperti pada masa Donald Trump. Dengan demikian, teori securitization dapat memberikan kerangka analisis yang sangat kuat untuk dapat memahami dinamika kebijakan keamanan digital di Amerika Serikat terhadap aplikasi Tiktok.

1.5.2 Keamanan Nasional

Keamanan nasional merupakan suatu konseptual dalam studi hubungan internasional dan kebijakan negara yang mencerminkan kemampuan suatu negara untuk menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan vitalnya dari berbagai ancaman, baik dari eksternal maupun internal. Menurut (Hermann 1969), keamanan nasional adalah kondisi dimana negara mampu melindungi eksistensi dan kepentingan vitalnya dari ancaman atau tekanan baik dari dalam maupun luar negeri, agar tetap melanjutkan fungsi dan kelangsungan hidupnya secara stabil, herman juga menekankan bahwa keamanan nasional tidak hanya terkait ancaman militer saja, tetapi juga mencakup ancaman politik, ekonomi, sosial, dan aspek-aspek lainnya yang dapat mengganggu kedaulatan dan stabilitas negara.

Secara tradisional, ancaman dalam keamanan nasional masih berupa aspek militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang mana tujuan utama dari keamanan nasional adalah untuk melindungi negara dari suatu ancaman yang mengganggu kelangsungan dan fungsi dari suatu negara (Hough 1966). Namun perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi mengubah pandangan ancaman yang dihadapi oleh negara-negara. Ancaman yang dulunya hanya berupa fisik kini meluas menjadi suatu ancaman yang bersifat non-tradisional, termasuk ancaman di sektor digital. Hal ini menuntut perluasan definisi dan pendekatan keamanan nasional agar mampu mengantisipasi dan mengelola resiko yang berasal dari sektor baru (Hough 1966).

Keamanan digital atau keamanan siber merujuk terhadap upaya perlindungan data, sistem informasi, jaringan, dan infrastruktur digital dari serangan dan gangguan yang berpotensi merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi hal tersebut sejalan dengan Dorothy Elizabeth Denning dalam bukunya yang berjudul *“Information Warfare and Security”*, menjelaskan definisi keamanan digital sebagai langkah-langkah perlindungan terhadap informasi dan sistem informasi agar terhindar dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, perubahan, atau kerusakan yang tidak diizinkan (Denning 1999). Denning juga menjelaskan mengenai tujuan utama dari keamanan digital seperti, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan keaslian. Dalam upaya untuk menjalankan tujuan tersebut, dorothy denning menjelaskan mengenai cara agar dapat mempertahankan keamanan digital yaitu:

- A menggunakan enkripsi dalam menjaga kerahasiaan data.
- B membatasi akses agar orang tertentu saja yang dapat masuk ke sistem.
- C menggunakan sistem pendeteksi serangan untuk mengetahui jika ada penyusup.
- D Melakukan audit agar dapat mengetahui penyebab serangan.
- E membangun sistem yang kuat.

Selain menekankan mengenai faktor teknis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dorothy Denning juga menekankan faktor non teknis yang dibutuhkan untuk keamanan digital seperti Kebijakan pemerintah (Denning 1999), untuk mengatur perlindungan data dan infrastruktur penting. Dalam pembahasan kebijakan, denning menekankan pentingnya kebijakan yang strategis, terukur, dan orientasi jangka Panjang dengan pendekatan yang berbasis evaluasi resiko, sehingga kebijakan yang dibuat terus berkembang. Dengan merujuk dari konsep tersebut, kebijakan keamanan digital dapat dipahami sebagai seperangkat aturan dan tindakan pemerintah yang bertujuan mengatur serta melindungi sistem dan data digital dari akses tidak sah dan berbagai ancaman keamanan yang dapat berdampak pada kepentingan nasional.

Aplikasi Tiktok yang telah melakukan beberapa pelanggaran dimasa Joe Biden seperti melanggar kebijakan “*Children’s Online Privacy Protection Act*” yang mana setiap platform internet harus memperoleh izin orang tua sebelum mengumpulkan informasi pribadi mengenai anak-anak dibawah 13 tahun dan Tiktok membayar denda sebesar 5,7 juta dolar untuk menyelesaikan pelanggaran yang telah dilakukan (Sheera 2020). Adapun konten Tiktok yang menjadi tren buruk kepada anak-anak muda di Amerika Serikat yang disebut “*Devious Licks*” karena tren tersebut berisi video anak-anak sekolah di Amerika Serikat melakukan aksi perusakan terhadap property sekolah, melakukan aksi vandalisme dan mengunggahnya di Tiktok. kepemimpinan Joe Biden memberikan pandangan bagaimana kebijakan digital diimplementasikan dengan pendekatan yang berbeda namun tetap bertujuan untuk kepentingan melindungi data dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemblokiran aplikasi Tiktok dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan keamanan digital Amerika Serikat karena merupakan tindakan pemerintah dalam membatasi akses terhadap platform digital yang dinilai berpotensi mengancam keamanan nasional. Untuk dapat menjelaskan lebih dalam, kebijakan yang telah dibuat oleh Joe Biden dapat dikaitkan dengan konsep keamanan digital dari Dorothy Elizabeth Denning dalam bukunya yang menekankan pentingnya perlindungan data, pencegahan terhadap ancaman digital dan pencegahan mengenai manipulasi informasi di ruang digital (Denning 1999). Sehingga keamanan digital merupakan salah satu konseptual yang dapat mengkaji permasalahan yang terjadi di Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Joe Biden.

1.5.3 Kebijakan Publik

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencaman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sehingga kebijakan dapat dipahami sebagai pedoman atau dasar Keputusan yang digunakan oleh individu, organisasi, atau pemerintah dalam

bertindak dan mengambil Keputusan. Sementara itu, menurut KBBI, publik merupakan orang banyak atau masyarakat (Bahasa 2016).

Dalam kajian ilmu politik dan hubungan internasional, kebijakan publik merupakan konsep yang menjadi focus utama dalam menganalisis tindakan pemerintah (Dye 2013). Thomas Dye dalam bukunya menjelaskan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam definisi ini kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan aktif pemerintah, tetapi juga Keputusan untuk tidak bertindak dalam menghadapi suatu persoalan (Dye 2013). Kebijakan publik tidak dapat terlepas dari konteks politik, karena kebijakan tersebut lahir dari melalui proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan, kekuasaan dan pertimbangan. David Easton mendefinisikan politik sebagai proses alokasi nilai-nilai secara otoritatif bagi masyarakat. Dalam kerangka ini kebijakan publik merupakan hasil nyata dari proses politik dalam sistem politik dalam suatu negara (Easton 1965).

Melalui sistem politik, berbagai tuntutan dan tekanan dari masyarakat maupun lingkungan eksternal diproses oleh lembaga-lembaga politik untuk kemudian direspon dalam bentuk kebijakan (Easton 1965), sehingga kebijakan merupakan bentuk dari respon pemerintah terhadap isu di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan pilihan politik pemerintah dalam menentukan prioritas, nilai, dan kepentingan yang akan diwujudkan (Dye 2013). Istilah kebijakan politik digunakan untuk menegaskan dimensi politik yang melekat didalam kebijakan publik. Kebijakan politik dapat dipahami sebagai secara konseptual sebagai kebijakan publik karena merupakan suatu hasil dari proses politik dan relasi kekuasaan. Istilah tersebut menekankan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah bukan hanya sekedar respon, tetapi Keputusan strategis dengan pertimbangan politik (Dye 2013).

Dalam konteks ini, kebijakan politik berbeda dengan respon politik. Menurut David Easton, respon politik dipahami sebagai cara sistem politik bereaksi terhadap input berupa tuntutan dan dukungan yang berasal dari Masyarakat maupun lingkungan internasional (Easton 1965). respon politik

pada umumnya berupa pernyataan, sikap, atau wacana politik yang belum tentu dilembagakan (Easton 1965). Sebaliknya kebijakan politik dapat dipahami sebagai pilihan politik pemerintah baik berupa tindakan ataupun Keputusan untuk tidak bertindak yang telah diformalkan dan dijalankan oleh pemerintah (Dye 2013).

Dalam konteks pemblokiran aplikasi Tiktok, kebijakan pemerintah Amerika Serikat dipahami sebagai bentuk kebijakan publik sebagaimana didefinisikan oleh Thomas Dye yaitu Keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka merespon persoalan publik (Dye 2013). Aplikasi Tiktok dipandang oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai isu publik karena berkaitan dengan perlindungan data warga negara dan keamanan nasional (Mcclain 2023). Oleh karena itu, tindakan pemerintah Amerika Serikat terhadap aplikasi Tiktok tidak berhenti sebatas wacana atau pernyataan politik, melainkan diwujudkan dalam keputusan resmi yang dilembagakan.

Kebijakan politik pemerintah Amerika Serikat tidak semata-mata bersifat teknis atau administratif. Kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang luas, seperti persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kepentingan negara dalam menjaga keamanan nasional di ruang digital (FALLON 2024). Oleh karena itu kebijakan publik Amerika Serikat terhadap aplikasi Tiktok dapat dipahami sebagai suatu kebijakan politik. Perbedaan antara respon politik dan kebijakan politik terlihat jelas dalam kasus Tiktok, dimana respon politik muncul dalam bentuk pernyataan pejabat pemerintah, kritik dari parlemen, atau pemberitaan media tentang resiko Tiktok (Easton 1965). Namun respon tersebut memberikan dampak setelah diubah menjadi sebuah kebijakan publik yang resmi dan mengikat seperti pembatasan pengguna Tiktok hingga pembatasan penuh.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana temuan disajikan dalam bentuk narasi, kata-kata dan bukan angka (Sugiono 2013). Hal tersebut dapat menjelaskan mengenai efektifitas kebijakan keamanan digital Donald Trump dan Joe Biden dalam pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi Pustaka. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari sumber-sumber bacaan seperti buku, jurnal, dan penelitian yang sudah ada (Adlini *et al.* 2022).

1.6.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah versi Miles dan Huberman (Matthew B. Miles 1994), yang menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian terdiri dari:

- 1) **Reduksi data:** Reduksi data adalah suatu proses analisis yang mencakup penyaringan, pengelompokan, pengkategorian, pengorganisasian, serta penghilangan data yang tidak relevan, sehingga data yang terkumpul dapat disusun dengan cara yang memudahkan verifikasi.
- 2) **Menyajikan data:** Data yang telah direduksi tidak akan memberikan pemahaman atau gambaran yang lengkap. Oleh karena itu, diperlukan penyajian data. Penyajian data kualitatif dapat disampaikan dalam bentuk narasi teks, matriks, grafik, jaringan, atau diagram. Semua format ini dirancang untuk mengorganisir informasi secara terstruktur dan mudah dipahami.
- 3) **Pengambilan Keputusan dan verifikasi:** Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam penelitian kualitatif. Penelitian harus mencapai kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran, yang disetujui oleh subjek tempat penelitian dilakukan.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1) Batasan Materi

Pada penelitian ini, penulis membatasi penelitian terkait kebijakan keamanan digital dalam pemblokiran aplikasi Tiktok pada masa kepemimpinan Joe Biden di Amerika Serikat. Pada masa jabatan presiden Joe Biden, aplikasi Tiktok berada dalam masa penentuan sebelum diputuskan akan tetap lanjut atau diblokir dari Amerika Serikat. Penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan keamanan digital dalam pemblokiran aplikasi Tiktok pada masa presiden Joe Biden.

2) Batasan Waktu

Penelitian ini memiliki batas waktu pada masa kepemimpinan Joe Biden (2021-2025), pada saat putusan akhir mengenai pemblokiran aplikasi Tiktok diputuskan.

3) Level Analisis

Level analisis menurut Kenneth Waltz terdiri dari level individu, level negara, dan juga level sistem internasional. Dimana level individu berupa presiden yang sebagai pemangku kebijakan. Kemudian level negara yaitu kebijakan Amerika Serikat dalam hal keamanan digital, kemudian level sistem internasional berupa kebijakan Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi hubungan internasional mengenai keamanan digital (Waltz 1959).

1.7 Argumen Dasar

Proses sekuritisasi dalam kebijakan keamanan digital pemerintahan Joe Biden membingkai Tiktok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Proses ini melibatkan pernyataan resmi, penerimaan dari audiens politik dan institusional, serta penetapan kedaulatan digital sebagai objek perlindungan. Konstruksi ancaman tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan dan pemblokiran Tiktok. Oleh karena itu, proses sekuritisasi menjadi faktor utama yang mendorong kebijakan pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II SEJARAH MASUKNYA APLIKASI TIKTOK DI AMERIKA SERIKAT

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai Sejarah masuknya aplikasi Tiktok di Amerika Serikat. Akan dijelaskan juga mengenai permasalahan aplikasi Tiktok yang terjadi pada masa jabatan Joe Biden (2021-2025) di Amerika Serikat yang mengakibatkan dibuatnya kebijakan pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat.

BAB III KEBIJAKAN KEAMANAN DIGITAL JOE BIDEN (2021-2025) DALAM PEMBLOKIRAN TIKTOK.

Pada bab ini penuli akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keamanan digital dalam pemblokiran Tiktok di Amerika Serikat.

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN DIGITAL JOE BIDEN TERHADAP PEMBLOKIRAN TIKTOK BERDASARKAN TEORI SEKURITISASI.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan keamanan digital presiden Joe Biden terhadap pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat berdasarkan proses sekuritisasi

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil yang sudah diteleti pada bab sebelumnya. Pada bagian ini juga akan disertakan daftar Pustaka yang digunakan penulis sebagai rujukan selama menyusun skripsi ini.

BAB II SEJARAH MASUKNYA APLIKASI TIKTOK DI AMERIKA SERIKAT

2.1 Perkembangan Tiktok di Global

Tiktok adalah aplikasi yang memungkinkan kita membuat dan berbagi video pendek dengan cara yang menyenangkan. Aplikasi ini berasal dari Tiongkok dan dibuat oleh perusahaan yang bernama ByteDance. Sebelum Tiktok dikenal di seluruh dunia, perusahaan ini sudah membuat aplikasi serupa yang bernama Douyin. Douyin ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang di Tiongkok saja, jadi orang di luar Tiongkok tidak bisa menggunakannya. Douyin memiliki fitur yang hampir sama dengan Tiktok, seperti membuat video pendek dan menambahkan efek atau musik. Namun, karena Douyin hanya untuk orang Tiongkok, Tiktok kemudian dikembangkan untuk orang di seluruh dunia. Dengan Tiktok, orang dari berbagai negara bisa membuat video pendek dan membagikannya dengan orang lain di seluruh dunia. Banyak orang yang suka menggunakan Tiktok karena mudah dan menyenangkan, dan sekarang Tiktok sudah menjadi salah satu aplikasi yang paling populer di dunia (McClain *et al.* 2024).

Pada tahun 2017, perusahaan teknologi asal Tiongkok bernama ByteDance membeli aplikasi Musicall.ly. Setelah itu, ByteDance menggabungkan fitur-fitur dari Musicall.ly dengan *platform* mereka sendiri yang bernama Douyin untuk menciptakan aplikasi baru yang bernama Tiktok. Pada tahun 2018, ByteDance mengumumkan bahwa Tiktok dan Musicall.ly akan digabungkan menjadi satu *platform* saja (Price 2018). Penggabungan ini membuat semua pengguna Musicall.ly secara otomatis dipindahkan ke aplikasi Tiktok. Dengan penggabungan ini, Tiktok menjadi aplikasi yang tersedia di seluruh dunia dan bisa diakses oleh banyak orang. Langkah ini menjadi titik penting dalam perkembangan Tiktok di pasar global, membuat aplikasi ini semakin populer dan digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Penggabungan ini membantu Tiktok mendapatkan pengguna yang lebih banyak dan memperluas jangkauannya ke berbagai negara (Russell 2018).

Aplikasi Tiktok cepat terkenal di seluruh dunia karena fiturnya yang unik dan cara kerjanya yang bisa menyesuaikan dengan minat pengguna. Pada tahun 2019, Tiktok mulai sangat populer di banyak negara, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Tenggara. Tiktok sukses karena strategi pemasarannya yang baik dan kerja sama dengan banyak selebriti atau influencer. Aplikasi ini juga mudah

digunakan untuk membuat dan membagikan video pendek yang kreatif. Fitur-fitur ini membuat orang semakin suka menggunakan Tiktok dan membuatnya menjadi salah satu aplikasi yang paling populer di dunia. Dengan demikian, Tiktok terus berkembang dan digunakan oleh banyak orang di berbagai negara. (Zhao, 2021).

Menurut laporan dari *Business of Apps*, pada kuartal kedua tahun 2022, aplikasi Tiktok telah mencapai 1,46 miliar pengguna aktif setiap bulannya di seluruh dunia. Ini berarti bahwa jumlah pengguna Tiktok meningkat sebesar 62,52% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika kita lihat kembali pada kuartal kedua tahun 2021, jumlah pengguna aktif bulanan Tiktok masih sekitar 564 juta pengguna. Ini menunjukkan bahwa Tiktok tumbuh sangat pesat dalam waktu satu tahun. Jika kita bandingkan dengan jumlah pengguna lima tahun yang lalu, pertumbuhan aplikasi Tiktok luar biasa. Jumlah pengguna bulanan aktif Tiktok telah meningkat lebih dari 1.000%. Ini berarti bahwa Tiktok telah menjadi aplikasi yang sangat populer dan digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Pertumbuhan yang sangat besar ini menunjukkan bahwa Tiktok telah berhasil menarik perhatian banyak pengguna dan terus berkembang dengan pesat. Dengan demikian, Tiktok menjadi salah satu *platform* media sosial yang paling sukses di dunia (Rahmawati 2021).

Berdasarkan data geografis, wilayah Asia Pasifik memiliki jumlah pengguna Tiktok paling banyak, yaitu sekitar 590 juta pengguna (tidak termasuk Tiongkok dan India). Diikuti oleh Eropa dengan 199 juta pengguna, dan Amerika Utara dengan 169 juta pengguna. Ini menunjukkan bahwa Tiktok sangat populer di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah Asia Pasifik (ravpreet kaur 2024). Saat ini, Tiktok telah menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di seluruh dunia. Menurut laporan dari *app figures*, Pada Agustus 2023, Tiktok berhasil mengalahkan Instagram sebagai aplikasi yang paling populer. Tiktok diunduh sebanyak 54 juta kali, sedangkan Instagram diunduh sebanyak 52 juta kali. Selain itu, aplikasi lain seperti Facebook, WhatsApp, dan Telegram juga termasuk dalam daftar aplikasi yang paling banyak diunduh pada bulan Agustus 2023 (ariel, 2023). Ini menunjukkan bahwa Tiktok semakin disukai oleh banyak orang dan telah menjadi salah satu aplikasi yang paling populer di dunia. Dengan popularitasnya yang terus

meningkat, Tiktok membuktikan dirinya sebagai *platform* yang sangat sukses dan diminati oleh banyak pengguna.

Meskipun Tiktok semakin populer, beberapa negara memiliki kekhawatiran tentang keamanan data pengguna di aplikasi ini. Mereka khawatir bahwa Tiktok, yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, dapat mengumpulkan data pengguna dan menggunakannya untuk tujuan yang tidak baik. Amerika Serikat, misalnya, khawatir bahwa Tiktok dapat digunakan untuk spionase karena perusahaan Tiongkok diwajibkan untuk mematuhi perintah Partai Komunis Tiongkok (shepardson, 2025). India bahkan melarang Tiktok pada tahun 2019 karena khawatir tentang konten pornografi dan pencurian data pengguna. Selain itu, Inggris dan Australia juga melakukan penyelidikan terhadap Tiktok, meskipun hasilnya tidak diumumkan secara publik (hern, 2019). Ini menunjukkan bahwa beberapa negara masih memiliki keraguan tentang keamanan dan privasi data pengguna di aplikasi Tiktok.

2.2 Masuknya Tiktok di Amerika Serikat

Aplikasi Tiktok kini telah menjangkau banyak negara di seluruh dunia dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat global. Salah satu faktor utama yang membuat Tiktok mudah diterima di berbagai lapisan masyarakat adalah kemampuannya dalam menyajikan konten yang menghibur dan menarik, serta keberadaan fitur "*For You Page*" (*FYP*) yang dirancang secara unik untuk menyesuaikan minat setiap pengguna. Tidak mengherankan jika aplikasi yang berasal dari Tiongkok ini mampu menjadi salah satu media hiburan digital yang digemari di berbagai belahan dunia (Hern 2022). Pada awal kemunculan aplikasi Tiktok di Amerika Serikat, Tiktok dengan mudah memasuki pasar remaja. Hal ini dikarenakan oleh keberadaan aplikasi terdahulunya yaitu Musicall.ly yang merupakan aplikasi yang dikenal dengan konten *lipsync* dan menari yang digemari oleh anak muda di Amerika Serikat. Masuknya aplikasi Tiktok di Amerika Serikat langsung mendapatkan respon yang baik dari pegiat media sosial di Amerika Serikat, terutama pada kalangan remaja (Kari Paul 2022).

Perkembangan aplikasi Tiktok di Amerika Serikat tidak lepas dari promosi yang dilakukan oleh para selebriti. Aplikasi Tiktok menjadi sangat populer di Amerika Serikat berkat dukungan dari banyak selebriti terkenal, salah satunya

adalah Jimmy Fallon. Dalam acara "*The Tonight Show*" yang membawakannya, Jimmy Fallon mendorong para penonton untuk menggunakan Tiktok sebagai *platform* untuk berbagi video-video kreatif mereka. Ia juga mengajak orang-orang untuk mengikuti berbagai tantangan yang sedang viral di aplikasi tersebut, seperti *#tumblewedchallenge* (Hub 2024).

Tantangan ini mengajak orang untuk melakukan gerakan berguling-guling di tanah seperti bola diiringi dengan musik koboi yang dimainkan di latar belakang. Dengan dukungan dari Jimmy Fallon dan selebriti lainnya, Tiktok semakin dikenal luas dan digemari oleh masyarakat Amerika Serikat. Banyak orang yang terinspirasi untuk membuat konten-konten kreatif dan mengikuti tantangan-tantangan yang ada di aplikasi tersebut. Hal ini membuat Tiktok semakin cepat berkembang dan menjadi salah satu aplikasi yang paling populer di Amerika Serikat (hub, 2024).

Selain Jimmy Fallon, Tony Hawk yang merupakan legenda skateboard di Amerika Serikat juga menggunakan aplikasi Tiktok pada tahun 2018. Tony Hawk termasuk pengguna awal aplikasi Tiktok di Amerika Serikat, dia menggunakan aplikasi Tiktok untuk berbagi konten menarik dan berinteraksi dengan penggemarnya. Tony Hawk juga beberapa kali melakukan kolaborasi bersama artis-artis lainnya, salah satunya adalah penyanyi terkenal Avril Lavigne. Dalam konten yang dibuat, terlihat Avril Lavigne menyanyikan lagunya yang berjudul "*Sk8er boi*" kemudian Tony Hawk muncul dan melakukan trik skateboard. Konten tersebut bertujuan untuk memperingati hari skateboard nasional dan juga mempromosikan "the skatepark project" milik Tony Hawk (carter, 2021).

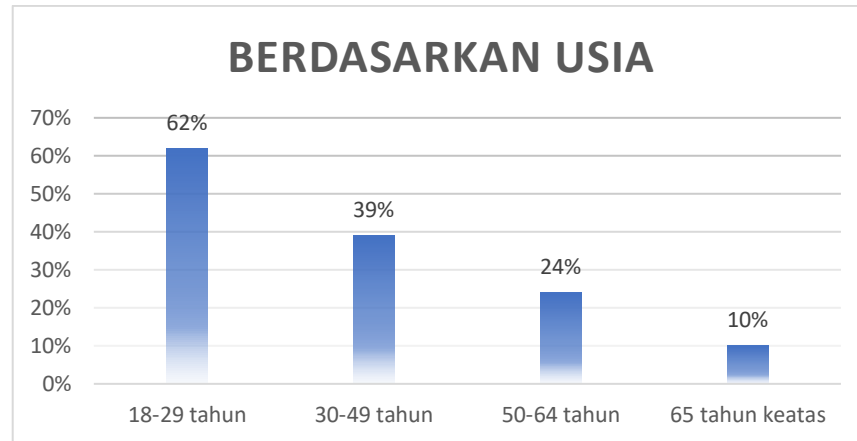
Selain melakukan kolaborasi bersama artis, Tony Hawk juga menjadi bintang iklan aplikasi Tiktok dalam promosi. Dalam iklan yang memiliki judul "*Not-so-extreme sport*", dalam iklan tersebut Tony Hawk mencari hobi baru setelah dokter melarangnya bermain skateboard, dia pun mencoba berbagai aktifitas baru di Tiktok dan menunjukkan bagaimana *platform* Tiktok dapat membantu orang untuk menemukan passion dan hobi baru (childers, 2023).

Promosi yang dilakukan oleh beberapa artis terkenal di Amerika Serikat berdampak besar pada peningkatan popularitas Tiktok. Aplikasi ini semakin dikenal luas dan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. waktu, penggunaan Tiktok terus meningkat dari tahun ke tahun, dan

semakin banyak tren yang muncul di kalangan warga Amerika Serikat. Hal ini membuat aplikasi Tiktok semakin populer dan dikenal oleh berbagai kalangan. Sampai tahun 2024, Tiktok telah memantapkan dirinya sebagai kekuatan global di media sosial, bahkan lebih berkembang daripada pendahulunya. Banyak konten kreator yang telah berhasil mengumpulkan pengikut dalam jumlah besar, membuktikan bahwa pengaruh Tiktok sangat besar di Amerika Serikat. Meskipun mayoritas pengguna aktif Tiktok adalah anak muda, mereka tampaknya tetap setia menggunakan aplikasi ini seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini membuat jumlah penggunanya terus bertambah (hub, 2024). Keberhasilan Tiktok dapat dilihat dari keputusan bisnis yang cerdas, yaitu pembelian aplikasi Musicall.ly. Langkah ini membantu Tiktok menjadi *platform* yang dapat menghubungkan dunia timur dengan kehidupan di bagian barat. Dengan demikian, Tiktok telah menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai budaya dan komunitas di seluruh dunia.

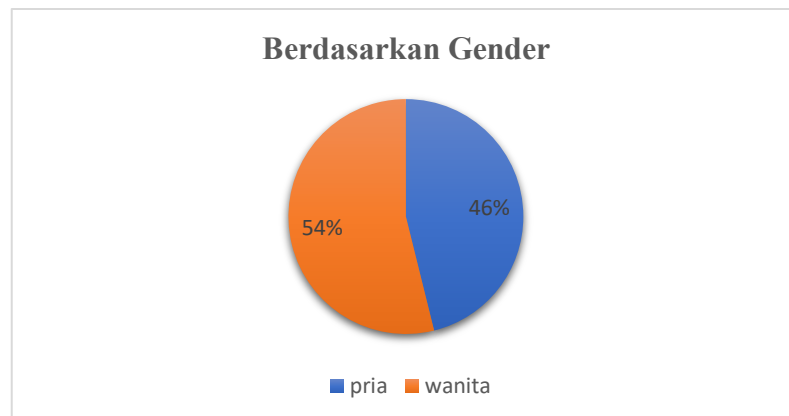
2.3 Pengguna Aplikasi Tiktok di Amerika Serikat

Pada awal peluncuran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat, aplikasi Tiktok dengan mudah berkembang di Amerika Serikat terutama pada kalangan remaja dikarenakan memiliki fitur yang hampir mirip dengan aplikasi terdahulunya yaitu Musicall.ly yang memang sudah terkenal di Amerika Serikat. Pengguna aplikasi Tiktok di Amerika Serikat terus mengalami peningkatan yang signifikan. Aplikasi Tiktok digunakan tidak hanya untuk media hiburan saja, tetapi juga menjadi media untuk berbagi konten edukasi dan lainnya. Amerika Serikat tercatat sebagai negara pengguna aplikasi Tiktok terbesar nomor dua di dunia dengan 121,5 juta pengguna. Menurut data dari *pew research center*, 62% penggunaa Tiktok di Amerika Serikat berusia 18-29 tahun, diikuti dengan 39% pengguna Tiktok di Amerika Serikat berumur 30-49 tahun, dan 24% pengguna Tiktok berusia 50-64 tahun, dan 10% berusia 65 tahun keatas (Hooda 2024).



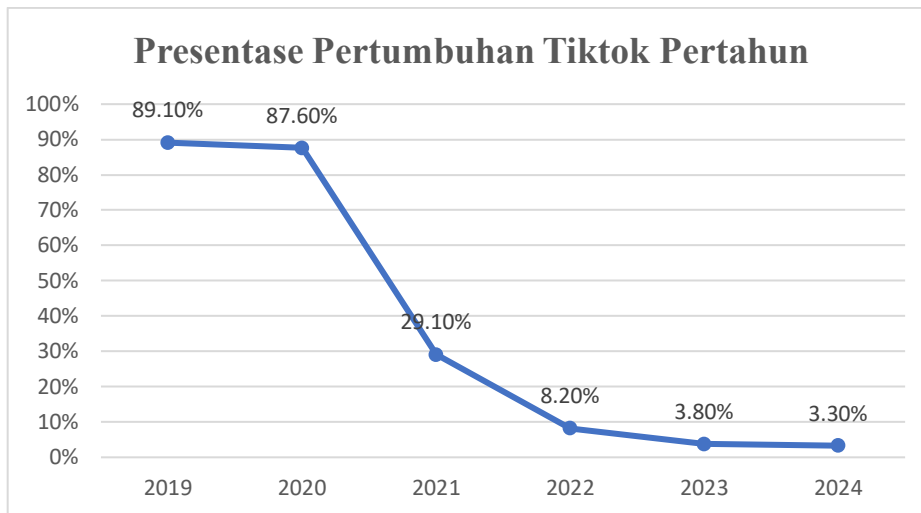
Gambar 2.1 Data Pengguna Tiktok Berdasarkan Usia di Amerika Serikat
Sumber : (Hooda 2024)

Sementara di Amerika Serikat jumlah pengguna aplikasi Tiktok berdasarkan gendernya, tingkat pengguna aplikasi Tiktok di Amerika Serikat didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki sehingga menunjukkan perbedaan yang relatif tinggi. Berdasarkan data dari data reptal pada tahun 2024, pengguna Tiktok 54,4% di Amerika Serikat adalah Wanita, dan 46,6% adalah pria (Kemp 2024).



Gambar 2.2 Diagram Data Pengguna Tiktok Amerika Serikat Berdasarkan Gender
Sumber : (Kemp 2024)

Di Amerika Serikat, pengguna aplikasi Tiktok di Amerika Serikat mengalami kenaikan pengguna dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari statista, kenaikan pengguna Tiktok di Amerika Serikat paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, pengguna Tiktok 89,1% lebih banyak dari tahun sebelumnya, begitupun tahun 2020, pengguna Tiktok 87,6% lebih banyak dari 2019. Namun terjadi penurunan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2024 pada masa presiden Joe Biden.



Gambar 2.3 Presentase Pertumbuhan Tiktok Pertahun di Amerika Serikat
Sumber : (Ceci 2025)

2.4 Permasalahan Tiktok di Amerika Serikat

Aplikasi Tiktok menghadapi permasalahan di Amerika Serikat pada era kepemimpinan Joe Biden di Amerika Serikat. Masalah keamanan nasional dan privasi menjadi alasan utama yang digunakan pemerintah Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali untuk melarang aplikasi Tiktok beroperasi di Amerika Serikat (Reuters 2025). Pada 2021, aplikasi Tiktok mulai di curigai akan menimbulkan masalah keamanan nasional dan privasi yang kemudian presiden pada saat itu Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif mengenai langkah tegas untuk membatasi penyebaran aplikasi-aplikasi guna melindungi keamanan data pribadi warga Amerika Serikat. Aplikasi Tiktok menjadi salah satu sorotan utama yang dianggap dapat memfasilitasi akses untuk melakukan berbagai kejahatan. Adapun dinamika yang pernah terjadi pada aplikasi Tiktok di Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Joe Biden diantaranya adalah:

2.4.1 Kasus Konten “*Devious Lick*” yang Terjadi di Kalangan Muda Amerika Serikat

Kasus “*devious lick*” adalah tren viral di Amerika Serikat pada tahun 2021, di mana para siswa mencuri atau merusak barang di sekolah, lalu membagikan videonya di Tiktok. Tren ini dimulai ketika pengguna Tiktok bernama “jugg4elias” mengunggah video ke platform Tiktok pada 1 september 2021 dengan menampilkan kotak masker yang diklaim telah

dicuri dari sebuah sekolah. Video tersebut ditonton sebanyak 345.800 kali sebelum dihapus oleh pihak Tiktok beberapa hari setelahnya (Rodriguez 2021). Tren ini menjadi viral pada kalangan siswa sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, mereka merusak fasilitas umum seperti kamar mandi dan kemudian mengunggah di platform Tiktok (Marples 2021).

Orang tua siswa di daerah Chandler dan Mesa telah menerima surat dari pejabat sekolah mengenai insiden yang terjadi di sekolah. Pejabat dari sekolah di Chandler mengatakan bahwa merusak properti sekolah adalah tindak pidana berat. Jika seorang siswa ketahuan merusak atau mencoret-coret, sekolah akan memberikan sanksi skorsing hingga laporan polisi. Pejabat sekolah dari Mesa juga mengatakan bahwa pencurian dan kerusakan properti sekolah akan mendapatkan konsekuensi yang sangat berat berupa pengusiran dan melibatkan polisi dalam hal ini. Seorang pejabat distrik di *tempe union* juga mengatakan bahwa akses ke kamar mandi untuk sementara dibatasi di sekolah-sekolah yang terdampak agar petugas keamanan dapat memantau insiden tersebut lebih lanjut (Fox10 2021).

2.4.2 Kasus Bunuh Diri Remaja 16 Tahun Akibat Algoritma Tiktok di Long Island

Kasus bunuh diri seorang remaja berusia 16 tahun asal *Long Island* bernama Chase yang mengakhiri hidupnya dengan melompat di depan kereta pada 18 Februari 2022. Akibat kematian chase, kedua orang tuanya menggugat Tiktok dengan gugatan perdata di mahkamah agung negara bagian New York dan mengatakan bahwa algoritma video di aplikasi tersebut berisi mengenai bunuh diri dan menjadi penyebab kematian putra mereka (NBC 2023). Pada 18 Februari 2022, Chase sedang dalam perjalanan pulang dari pusat kebugaran dan mengirimkan pesan kepada temannya yang bertulis “aku tidak sanggup lagi” sebelum mengakhiri hidupnya di rel kereta. Orang tua Chase menuduh bahwa selama beberapa jam dalam setiap hari sebelum meninggal video Tiktok depresif, kekerasan, dan bertema bunuh diri membanjiri algoritma Tiktok chase (Beasley 2023).

Dalam gugatannya juga dijelaskan bahwa Tiktok bekerjasama dengan akun-akun untuk membagikan video yang bersifat depresif dan kekerasan yang sebenarnya tidak tertuju kepada anak-anak namun dapat diakses dengan mudah oleh mereka. Orang tua dari Chase juga menambahkan bahwa Chase tidak memiliki Riwayat depresi dan mulai diarahkan kepada konten-konten tersebut mulai dari oktober 2021 (NBC 2023). orang tua chase juga menuntut Tiktok dan ByteDance selaku Perusahaan induk yang dianggap bertanggung jawab atas kematian anak mereka. Orang tua Chase menuduh bahwa aplikasi Tiktok memiliki desain yang berbahaya, tidak memberikan peringatan yang cukup, dan lalai dalam melindungi pengguna terutama terhadap anak-anak. Selain itu, orang tua Chase juga menuntut pihak (*metropolitan transportation authority*) MTA dan juga pemerintah lokal karena dianggap lalai dalam menangani kasus bunuh diri di sepanjang rel kereta api *long island rail road* yang mana 30 orang telah meninggal dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam 20 tahun terakhir (Beasley 2023). Maththew P. Bergman yang merupakan pengacara utama dari orang tua Chase mengatakan bahwa dia berupaya meminta pertanggungjawaban dari aplikasi Tiktok atas praktik-praktik berbahaya dan merugikan anak-anak terhadap resiko melukai diri sendiri demi meningkatkan pendapatan iklan mereka (Wire 2023).

2.4.3 Penyebaran Hoaks Dan Disinformasi Menjelang Pemilu Amerika Serikat 2024

Menurut laporan dari *the guardian*, media sosial Tiktok berpotensi menjadi media utama penyebaran misinformasi pada pemilu (Kari Paul 2022b). Invertigasi yang dilakukan global witness dan tim *cybersecurity for democracy* di NYU mengamati mengenai kemampuan Facebook, Youtube, dan Tiktok dalam mendeteksi dan menghapus disinformasi menjelang pemilihan paruh waktu Amerika Serikat. Dalam investigasi tersebut, Tiktok mengalami nasib yang buruk diantara media sosial lainnya, aplikasi Tiktok menyetujui 90% iklan yang berisi misinformasi pemilu yang sepenuhnya salah dan menyesatkan. Dalam penelitian tersebut, Tiktok memiliki performa yang paling buruk diantara semua platform yang diuji dengan hanya satu

iklan misinformation yang ditolak terkait vaksinasi covid yang menjadi syarat untuk pemungutan suara. Iklan yang memuat hari pemilu yang salah, membuat orang untuk memilih dua kali, menghalangi orang untuk memilih, dan merusak proses pemilu semuanya disetujui dan akun yang digunakan untuk mengunggah berita disinformasi tersebut masih aktif hingga mereka memberi tahu pihak Tiktok (Globalwitness 2022).

Seorang perakilan Tiktok menanggapi hasil eksperimen dengan menyatakan bahwa Tiktok merupakan tempat untuk konten yang asli dan menghibur. Oleh karena itu, mereka melarang dan menghapus informasi palsu mengenai pemilu serta iklan politik berbayar di platform Tiktok. Pihak Tiktok juga mengaku menghargai saran dari organisasi masyarakat, akademis, dan para ahli lainnya untuk membantu memperkuat kebijakan dan sistem dari Tiktok (Globalwitness 2022). Pihak Tiktok juga membuat pusat pemilu yang menyediakan informasi resmi tentang tempat memilih dan hasil pemilu dalam 45 bahasa. Semua video yang berkaitan dengan pemilu akan diberi label khusus yang bisa diklik untuk melihat info dari pemerintah, politisi, dan partai politik. Ini adalah pemilu pertama dimana Tiktok sudah punya pengalaman menghadapi hoaks, setelah sebelumnya saat pemilu 2020 banyak muncul konten politik menyesatkan di platform ini, yang awalnya hanya dikenal sebagai tempat video joget (Popli 2022).

2.4.4 Pelacakan Lokasi Jurnalis Amerika Serikat Oleh Karyawan ByteDance

Permasalahan Tiktok terkait dengan keamanan data terjadi pada 2022 yang mana karyawan ByteDance yang merupakan Perusahaan induk dari Tiktok yang berbasis di Tiongkok secara ilegal mengakses data pengguna Tiktok termasuk beberapa jurnalis di Amerika Serikat yang bertujuan untuk menyelidiki mengenai kebocoran informasi Perusahaan dan untuk menyelidiki potensi koneksi antara dua jurnalis Buzzfeed dan Financial Times (Shepardson 2022). Menanggapi permasalahan tersebut Financial Times melakukan pernyataan melalui laman webnya bahwa Tindakan memata-matai wartawan, mengganggu pekerjaan mereka, atau mengintimidasi narasumber mereka sama sekali tidak dapat diterima. Dan

pihak Financial Times akan menyelidiki berita ini lebih lanjut sebelum memutuskan tanggapan resminya (Murphy 2022). Lizzie Grams, yang merupakan juru bicara BuzzFeed mengatakan bahwa Perusahaan sangat terganggu oleh laporan tersebut yang menunjukkan pengabaian yang terang-terangan terhadap privasi dan hak-hak jurnalis serta pengguna Tiktok (Shepardson 2022).

Forbes juga melaporkan bahwa ByteDance telah melacak beberapa jurnalis dari Forbes termasuk yang sebelumnya bekerja di BuzzFeed yang bertujuan menemukan sumber kebocoran. Kepala konten Forbes, Randall Lane menyebutkan bahwa pelacakan yang dilakukan oleh ByteDance merupakan serangan langsung terhadap gagasan pers yang bebas dan peran pentingnya dalam demokrasi yang berfungsi (Guardian 2022). Tiktok menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan melalui akun Twitter bahwa mereka tidak mengumpulkan informasi GPS yang akurat dari pengguna di Amerika Serikat, yang menandakan bahwa mereka tidak dapat memantau pengguna di Amerika Serikat seperti yang diberitakan. Tiktok juga menambahkan bahwa menambahkan bahwa mereka tidak pernah digunakan untuk menargetkan anggota pemerintah Amerika Serikat, aktivis, ataupun jurnalis (Milmo 2022). Namun pada akhirnya pihak Tiktok mengatakan bahwa beberapa karyawannya secara tidak sah mengakses data pengguna Tiktok milik dua jurnalis. Seorang narasumber juga menambahkan bahwa terdapat empat karyawan ByteDance yang terlibat dalam masalah ini yang mana dua berasal dari Tiongkok dan dua berasal dari Amerika Serikat. Menurut juru bicara Tiktok, empat karyawan tersebut telah melakukan penyalagunaan wewenang yang sangat serius untuk mendapatkan akses ke data pengguna, sehingga empat karyawan tersebut tidak lagi bekerja di ByteDance (Aljazeera 2022).

2.4.5 Kasus *Slap a Teacher* Di Amerika Serikat Pada 2021

Selain tren *devisious lick*, terdapat juga tren *slap a teacher* yang menimbulkan kehebohan di beberapa sekolah di Amerika Serikat yang

mendorong siswa untuk menampar guru, atau melakukan penyerangan. Pihak Tiktok angkat bicara mengenai tren tersebut dengan mengatakan bahwa tren tersebut merupakan penghinaan terhadap guru dan konten tersebut akan dihapus dari platform karena telah melanggar pedoman komunitas. Seluruh sekolah di Amerika Serikat telah memberi tahu guru, orangtua dan para siswa mengenai konsekuensi atas tantangan tersebut apabila dilakukan (Gilbert 2021).

Departemen kepolisian Covington telah melakukan penangkapan terkait pertengkaran yang dilakukan oleh seorang siswa sekolah berusia 18 tahun bersama dengan seorang guru penyandang disabilitas berusia 64 tahun. Menurut polisi, siswa yang menyerang guru penyandang disabilitas tersebut diyakini terkait dengan tantangan dari aplikasi Tiktok. Siswa tersebut yang bernama Larrianna Jackson ditangkap dengan tuduhan penyerangan terhadap guru sekolah yang merupakan tindak pidana berat. Seorang petugas yang bekerja juga diberikan video yang merekam seluruh kejadian penyerangan tersebut. Dalam video tersebut, polisi mengatakan bahwa guru tersebut sedang duduk di kursi dan sedang berbicara dengan Larrianna, tak lama kemudian Larrianna meninju guru tersebut hingga terjatuh yang kemudian video tersebut dimatikan pada saat itu. Petugas mengatakan bahwa penyerangan tersebut dipicu oleh tren viral dari aplikasi Tiktok. Departemen kepolisian Covington mengingatkan semua orang bahwa siapa pun yang berpartisipasi dengan tantangan tersebut akan ditindak sesuai hukum (Team 2021).

Selain seorang siswa di Covington, tren *slap a teacher* juga dilakukan oleh siswa dari Braintree, Massachusetts. Siswa tersebut diduga menyerang seorang guru yang dikonfirmasi sama pihak distrik sekolah terinspirasi oleh tantangan *slap a teacher* di aplikasi Tiktok. Peristiwa tersebut terjadi di *East Middle School* di Braintree dan menyebabkan pihak sekolah mengirim surat kepada orang tua. Dalam surat yang diberikan oleh orang tua, pejabat sekolah mengatakan bahwa tren Tiktok baru-baru ini telah menyebabkan siswa berpartisipasi dalam aksi vandalisme di sekolah-sekolah seluruh negara. Pihak distrik juga mengatakan kepada orang tua

bahwa penyerangan fisik terhadap staf manapun di sekolah-sekolah Braintree akan langsung dilaporkan ke departemen kepolisian dan akan diberikan sanksi disiplin yang berat oleh pihak sekolah (News 2021).

Menurut laporan dari *Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy* yang di terbitkan di universitas Harvard, berita mengenai tren *slap a teacher* yang pertama kali muncul September 2021 mengenai seorang guru yang menemukan daftar *challenge* yang akan datang, para peneliti tidak dapat bukti bahwa daftar tersebut berasal dari Tiktok, melainkan menyebar melalui grup-grup di Facebook. Asisten peneliti mengatakan bahwa penyebaran misinformasi terkait tren *slap a teacher* di Tiktok merupakan bentuk dari manipulasi media (Perrett 2022). Dalam surat yang dibagikan kepada *the wall street journal*, Rebecca pringle yang merupakan presiden dari *the National Education Association* mengecam Tiktok, twitter, dan facebook atas peran mereka dalam tren tersebut dan mendesak Perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengakhiri tren kekerasan dan misinformasi serta mengubah algoritma demi keselamatan publik (Association 2021).

Tabel 2.1 Permasalahan Tiktok Pada Masa Joe Biden

Presiden	Permasalahan	Tahun
Joe Biden	Kasus " <i>Devious Lick</i> " di Amerika Serikat tahun 2021 melibatkan siswa yang mencuri atau merusak barang sekolah lalu membagikan videonya di Tiktok. Tren ini menyebabkan kerusakan sekolah dan sanksi bagi pelaku. Tiktok menghapus konten terkait karena melanggar aturan. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan edukasi penggunaan media sosial bagi remaja.	2021
Joe Biden	Pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, Tiktok menghadapi kritik serius karena dianggap menjadi media penyebaran hoaks menjelang Pemilu AS 2024. Investigasi Global Witness dan tim <i>Cybersecurity for Democracy</i> NYU menemukan bahwa Tiktok menyetujui 90% iklan berisi disinformasi pemilu, menjadikannya	2024

	platform dengan kinerja terburuk dibanding Facebook dan YouTube. Tiktok merespons dengan menyatakan komitmen untuk menghapus hoaks dan iklan politik berbayar, serta meluncurkan <i>Election Center</i> yang menyediakan informasi resmi pemilu dalam 45 bahasa.	
Joe Biden	Remaja 16 tahun, Chase Nasca, bunuh diri pada Februari 2022 setelah terpapar konten depresif dan bunuh diri di Tiktok. Orang tuanya menggugat Tiktok dan ByteDance atas algoritma berbahaya yang diduga mendorong kematian Chase. Mereka juga menuntut MTA karena lalai mengamankan area rel kereta tempat kejadian.	
Joe Biden	pada 2022, karyawan ByteDance secara ilegal mengakses data pengguna Tiktok, termasuk jurnalis Amerika Serikat, untuk menyelidiki kebocoran informasi internal. Financial Times, BuzzFeed, dan Forbes mengecam keras tindakan ini sebagai pelanggaran privasi dan serangan terhadap kebebasan pers. Tiktok awalnya membantah, namun akhirnya mengakui pelanggaran tersebut dan memecat empat karyawan yang terlibat, dua dari Tiongkok dan dua dari Amerika Serikat.	2022
Joe Biden	Tren " <i>slap a teacher</i> " di Amerika Serikat memicu kehebohan karena mendorong siswa menyerang guru. Tiktok menyatakan tren ini melanggar pedoman komunitas dan akan menghapusnya. Beberapa kasus penyerangan guru terjadi, termasuk di Covington dan Massachusetts. Sekolah dan polisi memperingatkan pelaku akan mendapat sanksi berat. Namun, laporan Harvard menyebut tren ini sebenarnya berasal dari Facebook, bukan Tiktok, sehingga menimbulkan misinformasi dan manipulasi media.	2021

BAB III

KEBIJAKAN KEAMANAN DIGITAL PRESIDEN JOE BIDEN DALAM PERMASALAHAN TIKTOK DI AMERIKA SERIKAT

3.1 Kebijakan Presiden Joe Biden dalam Permasalahan Tiktok di Amerika Serikat

Presiden Joe Biden memiliki pemikiran yang sama dengan presiden sebelumnya yaitu Donald Trump bahwa adanya aplikasi Tiktok dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat terkait data pengguna Tiktok di Amerika Serikat yang dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok melalui induk perusahaannya yaitu ByteDance. Presiden Joe Biden menilai bahwa kepemilikan ByteDance yang berasal dari Tiongkok menimbulkan risiko bahwa data pribadi warga Amerika Serikat dapat disalahgunakan oleh pemerintah Tiongkok. Direktur FBI, Cris Wray mengatakan kekhawatirannya mengenai kemampuan Tiongkok untuk mengontrol algoritma yang memungkinkan mereka memanipulasi konten dan bahkan memengaruhi kondisi di suatu negara (naveed, 2021).

Pemerintahan Presiden Joe Biden melanjutkan perhatian serius terhadap potensi risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh aplikasi Tiktok, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari pendahulunya. Biden mencabut larangan langsung yang diberlakukan oleh Donald Trump dan menggantinya dengan kebijakan berbasis evaluasi risiko yang melibatkan peninjauan menyeluruh oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat (michael T. borgia, 2021). Selain itu, pemerintahannya mendukung langkah-langkah legislatif untuk membatasi penggunaan Tiktok di perangkat pemerintah dan mengawasi kepemilikan serta pengelolaan data aplikasi tersebut. Sub bab ini akan membahas kebijakan Biden terkait Tiktok, termasuk penundaan pelarangan, pengawasan keamanan, dan upaya legislasi yang sedang berlangsung (Young 2023).

3.1.1 Perintah Eksekutif 14034 (2021)

Pada saat menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, Donald Trump membuat perintah eksekutif yang berisi bahwa segala transaksi antar perusahaan induk Tiktok yaitu ByteDance dan warga negara Amerika Serikat akan segera dilarang yang dikarenakan alasan keamanan nasional dan juga perintah eksekutif ini juga sebagai langkah untuk meningkatkan

tekanan terhadap aplikasi milik Tiongkok tersebut agar segera menjual asetnya kepada perusahaan Amerika Serikat (Allyn 2020). Setelah masa kepemimpinan Donald Trump berakhir, presiden Joe Biden membatalkan perintah eksekutif Trump dan menggantinya dengan perintah eksekutif baru yang berjudul *Executive Order on Protecting Americans' Sensitive Data from Foreign Adversaries* pada tahun 2021 yang berisi mengenai pencabutan larangan Tiktok dan wechat oleh presiden sebelumnya yaitu Donald Trump dan juga perintah agar kementerian perdagangan untuk melakukan peninjauan ulang atas potensi ancaman keamanan nasional yang mungkin ditimbulkan aplikasi yang ditimbulkan oleh musuh asing dan kemudian menentukan apakah aplikasi tersebut menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat (Learly 2021).

Pejabat pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Donald Trump tidak menunjukkan kriteria yang jelas sehingga akan dilakukan evaluasi dan diganti dengan perintah eksekutif yang baru (Jelita 2021). Perintah presiden Joe Biden untuk mengarahkan departemen perdagangan untuk memantau aplikasi perangkat lunak seperti Tiktok yang dapat mempengaruhi keamanan nasional Amerika Serikat, serta membuat rekomendasi dalam 120 hari untuk melindungi data Amerika Serikat yang diperoleh atau dapat diakses oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pihak asing. Kebijakan presiden Joe Biden mendapatkan komentar baik dari Gao Fang, yang merupakan juru bicara kementerian perdagangan Tiongkok, Gao Fang mengatakan bahwa Tiongkok telah memperhatikan bahwa Amerika Serikat memerlukan tinjauan keamanan yang baru terhadap aplikasi tersebut, dan berharap Amerika Serikat memperlakukan perusahaan Tiongkok secara adil dan menghindari politisasi masalah ekonomi dan perdagangan (Freifeld and Shepardson 2021).

3.1.2 Kebijakan No Tiktok on Government Devices Act

Selain mengeluarkan perintah eksekutif pada 2021, presiden Joe Biden juga mengesahkan sebuah undang-undang yang bernama *No Tiktok on Government Devices Act* pada 2022 sebagai upaya untuk melindungi

keamanan nasional dari resiko yang ditimbulkan oleh aplikasi Tiktok yang dimiliki oleh ByteDance, yang merupakan perusahaan asal Tiongkok (Bhuiyan 2022). Pemerintah Amerika Serikat memiliki kekhawatiran mengenai data pengguna yang akan dikumpul melalui aplikasi Tiktok yang kemudian dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok yang kemudian berpotensi untuk menjadi alat pengintaian dan juga manipulasi politik. Akibat dari kekhawatiran tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang yang bertujuan untuk melarang pegawai pemerintah federal, termasuk militer menggunakan Tiktok pada perangkat yang dimiliki oleh pemerintah serta kewajiban untuk menghapusnya dalam 30 hari (Riotta 2023). Namun terdapat pengecualian dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan penegakan hukum, kegiatan keamanan nasional, dan kegiatan terkait penelitian (Young 2023).

Dalam penerapannya, meski undang-undang tersebut secara umum berjalan lancar, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya terutama mengenai perangkat pribadi pegawai yang digunakan untuk bekerja. Perangkat tersebut bersifat privasi sehingga pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan (Bramwell 2024). Dalam laporan dari NTD *news* (Newsroom 2023), *tresury inspectorgeneral for tax administration* (TIGTA) telah melakukan inspeksi pada IRS dan menemukan bahwa IRS awalnya telah memblokir akses ke situs web Tiktok dan membuat aplikasi tersebut tidak dapat diakses oleh 6.300 perangkat seluler pada oktober 2022. Namun beberapa perangkat mendapatkan pengecualian. IRS menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberlakukan undang-undang tersebut karena adanya program yang bernama *bring your own device* (BYOD) yang mengizinkan pegawai menggunakan perangkat mereka sendiri untuk digunakan di kantor. IRS menyatakan bahwa mereka tidak dapat menegakkan undang-undang tersebut pada perangkat pribadi karena akan melanggar hak-hak konstitusi. Namun terdapat aturan sementara mengenai pemahaman mengenai perangkat pribadi pegawai yang mana aturan memperjelas bahwa perangkat pribadi pegawai termasuk dalam larangan apabila digunakan untuk

pekerjaan, namun jika perangkat tidak digunakan untuk pekerjaan, larangan tersebut tidak termasuk (Abraham 2023).

3.1.3 Kebijakan The Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACA)

Pada saat menjadi presiden Amerika Serikat, Joe Biden membuat sebuah kebijakan yaitu *The Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act* (PAFACA) pada tahun 2024 yang mana ini merupakan undang-undang yang memberi wewenang kepada presiden dan jaksa agung untuk mengawasi dan menilai aplikasi yang dikendalikan oleh musuh asing demi melindungi keamanan nasional Amerika Serikat (Foreign, Controlled, and Act 2024). Kebijakan *The Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act* (PAFACA) berisi larangan untuk mendistribusikan, memelihara, dan juga memperbarui aplikasi yang dikendalikan oleh musuh asing yang dilakukan dalam wilayah Amerika Serikat. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa musuh asing yang dimaksud ialah Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Rusia (Diamond *et al.*, 2024). Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang ini untuk memberikan wewenang kepadanya agar dapat memaksa ByteDance untuk menjual Tiktok atau akan dilarang di Amerika Serikat (Expert 2025).

Pembuatan undang-undang *protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act* (PAFACA) pun melalui proses pembahasan yang panjang di parlemen. Berdasarkan rapat yang dilakukan oleh para anggota parlemen di Washington, keamanan nasional menjadi fokus permasalahan yang dibahas oleh kedua partai tersebut (Release 2024b). Para anggota parlemen mempunyai kekhawatiran bahwa pemerintah Tiongkok dapat menekan ByteDance untuk menggunakan Tiktok untuk mengambil data pengguna Amerika Serikat yang kemudian dapat menyebarkan klaim palsu dan menyesatkan kepada para pemilih di Amerika Serikat. Banyak anggota parlemen yang mendukung pembuatan undang-undang PAFACA dengan mengatakan bahwa pengarah intelijen rahasia telah menimbulkan kekhawatiran mengenai aplikasi Tiktok. Tetapi

beberapa anggota parlemen mengatakan bahwa meski mereka memiliki kekhawatiran mengenai pengumpulan data yang akan dilakukan oleh musuh asing menurut rancangan undang-undang yang dibahas, belum ada bukti yang kredibel yang menyatakan bahwa aplikasi Tiktok mengancam keamanan nasional Amerika Serikat (Bond 2024). Setelah melalui rangkaian pembahasan yang cukup panjang, undang-undang tersebut akhirnya disetujui oleh parlemen pada 14 Maret 2024, dan ditandatangani oleh presiden Joe Biden pada 24 April 2024.

Undang-undang *protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act* (PAFACA) sering disebut sebagai kebijakan untuk pelarangan aplikasi Tiktok di Amerika Serikat, namun faktanya PAFACA merupakan kebijakan yang melayani kekhawatiran lama yang terjadi pada pembuat kebijakan di Amerika Serikat mengenai ancaman nasional yang ditimbulkan oleh aplikasi populer milik Tiongkok (Paulo 2024). Kebijakan PAFACA ini pada dasarnya membahas mengenai pelanggaran penyediaan tertentu untuk mendistribusikan, memelihara, atau memperbarui aplikasi yang dikendalikan oleh musuh asing. Undang-undang ini pun secara tegas mencakup aplikasi yang dioperasikan oleh musuh asing dalam hal ini Tiongkok. Tiktok yang merupakan aplikasi dari perusahaan ByteDance yang berasal dari Tiongkok memungkinkan penggunaannya untuk dapat berbagi konten satu sama lain merupakan salah satu kekhawatiran terbesar yang dapat mengancam keamanan nasional Amerika Serikat yang ditetapkan oleh presiden sebagai ancaman yang signifikan (May 2024).

3.2 Tindakan Kementerian Perdagangan Terkait Perintah Eksekutif Presiden Joe Biden

Sesuai dengan yang dikeluarkan oleh presiden Joe Biden dalam perintah eksekutif pada 2021, kementerian perdagangan diberi tugas untuk melakukan peninjauan dan melakukan evaluasi resiko yang ditimbulkan oleh aplikasi yang dikuasai oleh musuh asing termasuk aplikasi Tiktok dan Wechat. Peninjauan yang dilakukan oleh kementerian perdagangan terhadap aplikasi tersebut berbasis bukti dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi keamanan

nasional Amerika Serikat. Kementerian perdagangan juga ditugaskan untuk memberikan rekomendasi tindakan untuk melindungi data sensitif warga Amerika Serikat dan mengatasi resiko yang mungkin ditimbulkan oleh entitas yang terhubung dengan musuh asing (Kohne *et al.* 2021).

Kementerian Perdagangan telah menetapkan sejumlah pertimbangan dalam menilai risiko terhadap keamanan nasional yang berkaitan dengan aplikasi yang dirancang, dikembangkan, atau disediakan oleh entitas yang memiliki keterkaitan dengan negara musuh. Pertimbangan ini mencakup kepemilikan atau kendali oleh pihak yang terafiliasi dengan kegiatan militer atau intelijen negara musuh, potensi penggunaan aplikasi untuk kegiatan pengawasan yang dapat membuka peluang spionase atau akses terhadap informasi sensitif, serta adanya audit yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mendeteksi dan meminimalkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat (Kohne *et al.* 2021).

3.3 Kerjasama Antara Tiktok Dan Walmart

Pada bulan september 2020, Tiktok telah menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Amerika Serikat yaitu walmart untuk mengakusisi 7,5% saham dari Tiktok global. Walmart bersama dengan oracle akan mengambil 20% saham dari perusahaan baru yang akan dibuat yaitu Tiktok global, dengan ByteDance yang merupakan perusahaan induk dari Tiktok memiliki saham mayoritas dari Tiktok global dengan 80% (Walker 2020). Dalam kesepakatan yang telah terjalin, walmart bersedia memberikan layanan seperti *e-commerce* dan *marketplace* yang mendukung aktifitas belanja online dalam aplikasi Tiktok, adapun juga layanan *Fulfillment* yang mendukung sistem pembayaran serta layanan periklanan *omnichannle* yang merupakan iklan berbasis data yang bertujuan membuat Tiktok berkembang bukan hanya media hiburan, tetap juga sebagai platform *sosial commerce*. Selain itu dijelaskan juga dalam unggahan dari walmart bahwa CEO mereka, Doung McMillon akan menjabat sebagai salah satu anggota dewan perusahaan yang akan dibentuk (walmart 2020).

Walaupun proyek mengenai Tiktok global gagal terlaksana, namun kerjasama dalam hal komersil dan pemasaran digital antara Tiktok dan walmart tetap terlaksana. Salah satu pencapaian positif dari kerjasama tersebut ialah pada

desember 2020, untuk pertama kali dilakukan uji coba *live streaming shopping* yang dilakukan walmart di Tiktok. dari uji coba tersebut, tercatat tujuh kali lebih banyak penonton dibanding prediksi awal dan juga mampu meningkatkan pengguna Tiktok sebesar 25%. Akibat keberhasilan tersebut, walmart melakukan format yang sama pada tahun selanjutnya (Perez 2021). Selain itu, melalui layanan *walmart connect*, pengiklanan di Tiktok terbukti sangat efektif hingga 2024 dengan tingkat interaksi dua kali lebih tinggi serta keuntungan iklan hingga 3,5 kali lipat (Walmart 2024). dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa meskipun walmart tidak menjadi pemilik saham Tiktok, kerja sama tetap berjalan bahkan memberikan banyak manfaat seperti peningkatan penjualan online, hingga menjangkau lebih banyak konsumen melalui *sosial commerce*.

3.4 Persaingan Tiktok Dengan Perusahaan Teknologi Amerika Serikat

Kehadiran aplikasi Tiktok sebagai platform berbasis video pendek bukan hanya sebagai inovasi berbentuk hiburan di Amerika Serikat, tetap hal tersebut memicu persaingan ekonomi digital global, terutama di Amerika Serikat. Popularitas aplikasi Tiktok yang melesat di kalangan anak muda menjadikan aplikasi Tiktok menjadi salah satu aplikasi dengan pertumbuhan tercepat, yang sekaligus membuat aplikasi serupa seperti Meta dan Youtube yang merasa terancam dalam ekosistem media sosial. Berikut akan dibahas mengenai keberadaan Tiktok dapat mempengaruhi strategi bisnis dari kedua perusahaan tersebut di Amerika Serikat (Williams 2022).

3.4.1 Strategi Meta Menghadapi Dominasi Tiktok Di Pasar Amerika Serikat

Semenjak menjadi aplikasi dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat, Tiktok dipandang oleh Meta sebagai ancaman yang dapat menggeser dominasi mereka di media sosial. Ancaman tersebut membuat Meta untuk memberikan dana lebih pada berbagai lini baik dari teknologi maupun politik. CEO Meta, Mark Zuckerberg telah berencana untuk memangkas rekrutan terhadap insinyur sedikitnya 30% pada tahun 2022. Pada awalnya Meta berencana merekrut sekitar 10.000 insinyur baru, namun Meta telah mengurangi target perekrutan tersebut menjadi sekitar 6.000-7.000 insinyur baru. Selain mengurangi angka rekrutan insinyur baru,

Meta juga membiarkan beberapa posisi tidak terisi sebagai respon terhadap pengurangan karyawan dan menyingkirkan staf yang bekerja tidak memenuhi target. Mark juga memperingatkan juga bahwa mereka akan menghadapi penurunan ekonomi terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah (Katie Paul 2022).

Dalam bidang teknologi Meta telah mengeluarkan dana yang besar untuk riset dan pengembangan signifikan yang bertujuan mengeluarkan fitur terbarunya yaitu *instagram reels* dan *facebook reels* sekaligus untuk mengatur algoritma rekomendasi konten video tersebut. dalam surat yang dikeluarkan oleh *chief product officer* Meta Chris Cox, dia memperingatkan mengenai masa-masa sulit yang akan terjadi pada paruh kedua tahun 2022 (Heath 2022). Dalam surat yang dikeluarkan oleh Chris Cox, menjelaskan mengenai enam sektor yang akan di investasikan lebih oleh Meta. Sektor tersebut meliputi Metaverse, AI, reels dan *discovery engine*, pesan komunitas, privasi dan monetisasi. Peningkatan investasi yang dilakukan oleh Meta di reels merupakan upaya untuk membuat konten video pendek yang sebelumnya telah dipopulerkan oleh aplikasi Tiktok. akibat dari fitur tersebut, Chris Cox mengatakan bahwa waktu yang dihabiskan di reels secara keseluruhan telah meningkat lebih dari dua kali dari tahun ke tahun baik di Amerika Serikat maupun di global (Murtaza 2022).

Strategi Meta dalam bersaing dengan aplikasi Tiktok juga dapat terlihat dengan memperkuat monetisasi kreator melalui program bonus, iklan di reels dengan sistem *performance based payout* serta fitur donasi star yang membuat penggemar dapat langsung mendukung kreator (Meta 2023). Meta juga menjalankan strategi promosi dan insentif yaitu membayar kreator untuk mempromosikan instagram di platform lain. Dengan program tersebut Meta menargetkan agar reels menjadi pilihan utama dari kreator dibanding platform lainnya termasuk Tiktok. Meta yang merupakan perusahaan induk dari aplikasi facebook dan instagram telah dilaporkan atas tuduhan mendanai sebuah *black campaign* yang bertujuan untuk merusak reputasi dari Tiktok. menurut *the guardian* (Oladipo 2022), Meta menggunakan bekerjasama dengan dengan firma strategi partai republik

yaitu *targeted victory* untuk memberikan opini dan surat kepada editor di berbagai media untuk menuduh Tiktok sebagai bahaya terhadap anak-anak di Amerika Serikat seperti tren *devisious lick*, hingga tren *slap a teacher*. Namun diketahui dari beberapa investigasi diketahui bahwa sebagian tren yang dilakukan di Tiktok bermula dari platform di Meta (Soros 2022)

Andy Stone yang merupakan perwakilan dari Meta mengatakan bahwa semua platform termasuk Tiktok harus menghadapi tingkat pengawasan yang sama dibalik kesuksesan yang terus meningkat. Anna Foley dalam sebuah podcast menjelaskan bahwa tren-tren yang terjadi di Tiktok seperti *devisious lick* pada 2021 yang disebarkan oleh *targeted victory* di berbagai media lokal di Michigan, Rhode Island, Massachusetts Dan Washington merupakan tren yang awalnya menyebar di facebook (Oladipo 2022). Walaupun *Targeted Victory* mengatakan bahwa mereka memang telah bertahun-tahun bekerjasama dengan Meta, mereka mengatakan bahwa klaim mengenai aksi *black campaign* yang dilakukan oleh mereka merupakan penggambaran yang salah mengenai pekerjaan mereka. CEO *Targeted Victory* yaitu Zac Moffatt dalam akun twetternya mengatakan bahwa berita yang disebarkan oleh Washington Post tidak menggambarkan pekerjaan yang kami lakukan, dan telah menghubungi Washington Post untuk membahas lebih lanjut, namun tidak mendapatkan respon (Hale 2022).

Walapun dari pihak *Targeted Victory* telah mengatakan bahwa mereka tidak melakukan aksi *black campaign* sesuai yang telah di beritakan oleh Washington Post, pihak dari Meta tidak menyangal apa yang diberitakan oleh Washington Post mengenai *black campaign* yang dilakukan oleh *Targeted Victory* yang bekerja sama dengan Meta. Pihak dari Meta bahkan mengkonfirmasi bahwa mereka memang telah mempekerjakan *Targeted Victory* dan mengatakan bahwa semua platform termasuk Tiktok harus menghadapi tingkat pengawasan yang sama seiring dengan kesuksesan platform yang semakin meningkat. Laporan negatif mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Meta dengan *Targeted Victory* didukung dengan adanya berita yang dikeluarkan oleh the washington post mengenai

Targeted Victory yang ditugaskan untuk menciptakan citra positif dari Facebook di media lokal Amerika Serikat seperti adanya sebuah surat yang berisi mengenai kontribusi Facebook dalam mendukung usaha yang dimiliki oleh golongan kulit hitam di Amerika Serikat (News 2022). Dari adanya pemberitaan negatif mengenai kerjasama Meta dengan *Targeted Victory* dalam membentuk citra Tiktok menjadi buruk, dapat memperlihatkan kerasnya persaingan antar perusahaan teknologi besar yang terjadi di Amerika Serikat. Alasan dibalik aksi *black campaign* yang dilakukan oleh Meta jelas diakibatkan Tiktok yang dianggap sebagai pesaing utama yang pertumbuhannya cukup pesat terutama dikalangan anak muda yang berpotensi mengancam dominasi Meta di pasar sosial media.

3.4.2 Youtube Short Sebagai Bentuk Strategi Youtube Melawan Tiktok

Selain terhadap Meta, Tiktok juga menjadi ancaman kepada platform Youtube. Pada mei 2020, Susan Wojcicki yang merupakan CEO dari Youtube menyatakan bahwa Tiktok merupakan kompetitor yang harus diperhatikan (Bloombers 2020). Wojcicki juga menjelaskan dalam sebuah forum ekonomi dunia di Davos, Swiss pada tahun 2022 bahwa Youtube melihat persaingan yang sangat kuat dari perusahaan asal Tiongkok, khususnya dengan Tiktok (Sohail 2022). Akibat dari adanya ancaman dikarenakan Tiktok yang terus meningkat penggunaannya di Amerika Serikat, pihak Youtube berusaha membuat strategi agar Youtube dapat menyaingi platform media sosial lainnya terutama Tiktok. salah satu strategi yang dilakukan oleh oleh Youtube adalah dengan dikeluarkannya fitur *Youtube Shorts* pada 2020 yang digagas oleh Chris Jaffe yang merupakan *vice president of product management* di Youtube. Chris menjelaskan bahwa *Youtube Shorts* dirancang agar membantu para kreator untuk dapat mengekspresikan diri dengan cara cepat dan sederhana melalui video singkat yang berdurasi 15 detik (Jaffe 2020).

Selain mengeluarkan *Youtube Shorts* sebagai strategi dalam bersaing dengan Tiktok, Youtube juga meluncurkan program insentif yang bertujuan untuk menarik lebih banyak kreator di *Youtube short*. Dalam program

insentif yaitu *Youtube Shorts* fund senilai 100 juta dolar Amerika Serikat hingga strategi bagi hasil dari iklan khusus untuk *Youtube Shorts* (Singer 2021). Strategi yang dilakukan oleh Youtube terbukti efektif dalam penerapannya, terbukti pada tahun 2024, Youtube melaporkan bahwa fitur *Youtube Shorts* telah ditonton lebih dari 70 miliar kali dalam setiap harinya (Kim 2024). Dari apa yang telah dilakukan oleh Youtube dapat diketahui bahwa strategi Youtube dalam membuat fitur baru dan program insentif merupakan strategi yang dilakukan untuk bersaing dengan aplikasi Tiktok, hal itu dikarenakan aplikasi Tiktok merupakan aplikasi yang berisi video singkat berdurasi satu menit yang dapat memungkinkan penonton dengan mudah memahami video tanpa harus menontonnya berlama-lama, berbeda dengan Youtube yang berdurasi panjang sehingga penonton lebih menghabiskan waktu lama dalam memahami video yang dibuat. *Youtube Shorts* hadir sebagai alternatif untuk menonton video singkat di aplikasi Youtube, sehingga strategi *Youtube Shorts* yang dibuat oleh Youtube secara khusus dibuat untuk bersaing dengan aplikasi Tiktok.

3.5 Sidang Antara Komite Energi dan Perdagangan Dengan CEO Tiktok

Setelah mendapatkan berbagai permasalahan di Amerika Serikat, pihak Tiktok menghadiri sidang yang diadakan dengan komite energi dan perdagangan pada tanggal 3 maret 2023. Show Zi Chew yang merupakan CEO dari Tiktok menghadiri sidang tersebut secara langsung dan selama lima jam yang membahas tentang keselamatan dan keamanan aplikasi Tiktok termasuk hubungan perusahaan dengan Tiongkok. Beberapa anggota komite menaruh kekhawatiran mengenai perusahaan induk Tiktok yaitu ByteDance yang mempunyai kemungkinan untuk membagikan data pengguna Tiktok Amerika Serikat kepada pemerintah Tiongkok (Kongres 2023). Dalam sidang yang berlangsung pada Maret 2023, para anggota komite mengajukan pertanyaan terkait hubungan antara CEO Tiktok dengan para eksekutif di ByteDance, perusahaan induk Tiktok. Para anggota komite dari partai republik dan demokrat pun menginterogasi CEO Tiktok mengenai privasi data, kemungkinan terjadinya kecanduan terhadap remaja yang menggunakan aplikasi Tiktok dan misinformasi. Cathy McMorris Rodgers yang merupakan ketua komite bahwa Tiktok merupakan senjata partai komunis Tiongkok untuk memata-matai

dan memanipulasi warga amerika kedepannya. Rogers meminta untuk CEO Tiktok agar mengatakan dengan keyakinan 100% bahwa karyawan perusahaan induk Tiktok yaitu ByteDance tidak akan memata-matai warga Amerika Serikat atau mempromosikan video yang menguntungkan kepentingan Tiongkok (Kerr 2023).

Dalam menanggapi pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, CEO Tiktok Show Chew mencoba menjawab tanpa menyinggung pemerintah Amerika Serikat. Namun Chew gagal dalam mencapai kesepakatan dengan parlemen yang membuat parlemen Amerika Serikat semakin ingin untuk menghukum aplikasi Tiktok yang perusahaan induknya berada di Tiongkok. Setelah sidang berakhir, Brooke Oberwetter yang merupakan juru bicara Tiktok menyatakan bahwa komite tidak mengakui upaya yang dilakukan Tiktok untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh para anggota parlemen. Sidang yang dilaksanakan tidak menyelesaikan pertikaian antara pemerintahan Amerika Serikat dan pihak Tiktok, tidak ada bukti yang tersedia bahwa pemerintah Tiongkok telah mengakses data pengguna aplikasi Tiktok di Amerika Serikat. Namun beberapa pakar keamanan nasional di Amerika Serikat mengatakan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi, namun pihak Tiktok mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok tidak pernah terbukti memengaruhi algoritma Tiktok meskipun para pakar keamanan nasional mengatakan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi. Namun pihak Tiktok mengakui bahwa karyawan perusahaan di Tiongkok telah mengakses data beberapa jurnalis di Amerika Serikat, dan insiden ini sedang dilakukan penyelidikan di departemen kehakiman Amerika Serikat (Kongres 2023).

3.6 Aturan Pemerintah Amerika Serikat yang Dilanggar Aplikasi Tiktok

3.6.1 Aturan Mengenai Privasi Anak-Anak Dibawah 13 Tahun

pada tahun 2024, FTC memberikan gugatan pada Tiktok karena gagal mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi anak-anak dibawah 13 tahun tanpa persetujuan orang tua dan juga gagal melakukan penghapusan data yang diajukan oleh orang tua (FTC 2024). Oleh karena itu, Tiktok tidak hanya melanggar undang-undang COPPA saja melainkan juga melanggar prinsip dari FTC yaitu *unfair or deceptive acts or practices* yang mana setiap perusahaan yang beroperasi di Amerika Serikat tidak boleh melakukan praktik

menipu dan tidak adil terhadap konsumen (FTC 2024). Dalam kasus ini prinsip FTC yang dilanggar oleh Tiktok antara lain:

- A. Tiktok tetap mengumpulkan data pribadi anak di bawah 13 tahun tanpa persetujuan orang tua
- B. Data yang telah dikumpulkan tidak segera dihapus oleh Tiktok walaupun telah diminta oleh orang tua
- C. Beberapa akun anak-anak masih tetap publik, sehingga siapapun dapat melihat konten yang dibuat.

Lina Khan, yang merupakan ketua FTC mengatakan bahwa Tiktok secara sadar dan berulang kali melanggar privasi anak-anak. ByteDance dan Tiktok diduga telah menyadari perlunya mematuhi aturan mengenai privasi anak-anak, namun ByteDance dan Tiktok selama bertahun-tahun dengan sengaja membiarkan jutaan anak di bawah 13 tahun menggunakan platform Tiktok tanpa persetujuan orang tua mereka (FTC 2024). Akibat dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa ByteDance serta platform Tiktok tidak mematuhi aturan mengenai perlindungan data terutama terhadap anak-anak.

3.6.2 Tiktok Melanggar Aturan Dari CFIUS

Committee on foreign investment in the united states (CFIUS) merupakan lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertugas untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman asing yang muncul akibat investasi asing di perusahaan Amerika Serikat (Zealand *et al.* 2025). Pada tahun 2019 CFIUS melakukan penyelidikan terhadap akuisisi ByteDance terhadap Musical.ly yang mana pada 2017 ByteDance tidak melapor pengakuisisian Musical.ly kepada CFIUS. Tujuan CFIUS melakukan penyelidikan agar menilai ancaman Tiktok terhadap keamanan nasional Amerika Serikat (Greg Roumeliotis, 2019). Hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh CFIUS terhadap Tiktok terdapat dalam perintah eksekutif presiden 2020 yang menyatakan bahwa presiden Donald Trump melalui rekomendasi dari CFIUS memerintahkan ByteDance untuk memisahkan dan menyerahkan data pengguna aplikasi Tiktok di Amerika Serikat dari ByteDance (Donald J. Trump 2020).

Dalam sidang antara pihak Tiktok dan komite energi dan perdagangan Amerika Serikat, juru bicara Tiktok mengatakan bahwa sejak Oktober 2022, semua data pengguna Amerika Serikat telah disimpan di oracle dan dilindungi sepenuhnya dari jangkauan pemerintah asing manapun. Namun CEO Tiktok, Shou Zi Chew mengatakan dalam sidang bersama komite bahwa karyawan ByteDance yang berbasis di Tiongkok mungkin masih memiliki akses ke beberapa data Amerika Serikat dari Tiktok dan menambahkan bahwa akses terhadap data pengguna Amerika Serikat akan benar-benar tidak dapat diakses setelah proyek texas selesai (Feiner 2023). Namun hingga akhir masa jabatan presiden Joe Biden proyek Texas tidak benar-benar terlaksana yang berarti data pengguna Tiktok Amerika Serikat masih memungkinkan untuk diakses oleh pegawai ByteDance di Tiongkok (Perault 2024), keadaan ini semakin memburuk ketika karyawan ByteDance di Tiongkok kedapatan melacak lokasi dari dua jurnalis Amerika Serikat dari Buzzfeed dan Financial Times yang membuat pemerintah segera membuat kebijakan kepada Tiktok untuk dijual atau dialihkan ke negara diluar musuh asing apabila ingin tetap beroperasi di Amerika Serikat (Reuters 2024a).

3.6.3 Algoritma Tiktok Bertentangan Dengan Prinsip *Digital Transparency and Accountability*

Prinsip *Digital Tranparency and Accountibilty* pada dasarnya masih berupa rancangan undang-undang di Amerika Serikat, namun terdapat aturan serupa dengan prinsip tersebut. *Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)* merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber dan infrastruktur yang memiliki *Cybersecurity Performance Goals (CPGs)* yang merupakan paduan keamanan siber nasional untuk melindungi sistem dari ancaman siber (President 2021). CPGs tercipta pada tahun 2022 atas perintah eksekutif presiden Joe Biden 2021 yang memerintahkan pembentukan standar nasional untuk peningkatan keamanan siber dan memberikan mandat kepada CISA untuk membuat pedoman tersebut (President 2021).

Namun terdapat laporan dari *Congressional Research Service (CRS)* yang menjelaskan mengenai cara kerja aplikasi Tiktok serta kekhawatiran mengenai keamanan data dan transparansi algoritma. Dalam laporannya, CRS menjelaskan bahwa cara kerja dalam algoritma video pada Tiktok tidak dijelaskan secara transparan serta bagaimana data pengguna dipergunakan. Hal tersebut yang membuat CRS merasa khawatir mengenai data pengguna Tiktok di Amerika Serikat dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok (Figliola 2023). Dari laporan tersebut dapat diketahui bahwa transparansi dan keamanan data menjadi masalah serius sehingga laporan dari CRS menjadi salah satu acuan munculnya kebijakan atau aturan baru di Amerika Serikat terhadap aktivitas aplikasi Tiktok.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN DIGITAL JOE BIDEN TERHADAP PEMBLOKIRAN TIKTOK BERDASARKAN TEORI SEKURITISASI

4.1 Kebijakan Keamanan Digital Presiden Joe Biden

Pada masa pemerintahan presiden Joe Biden, keamanan digital menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional Amerika Serikat. perkembangan pesat teknologi dan meningkatnya peran aplikasi asing dalam kehidupan digital warga Amerika Serikat membuka peluang sekaligus risiko baru, khususnya terkait potensi pengumpulan data pribadi dan intervensi asing yang berbahaya (Nist 2021). Sebagai suatu langkah strategis, pemerintah Joe Biden, mengeluarkan *executive order* 14034 pada 2021. Perintah eksekutif tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap aplikasi asing yang dinilai berpotensi mengancam keamanan nasional (Biden 2021). Dalam konteks ini, Tiktok, sebagai aplikasi sosial media milik ByteDance asal Tiongkok, menjadi fokus utama. Pemerintah Amerika Serikat menilai Tiktok dapat digunakan sebagai alat untuk mengakses data warga Amerika secara tidak sah dan berpotensi mempengaruhi opini publik melalui penyebaran informasi yang dikontrol oleh pihak asing (Press 2024)

Selain perintah eksekutif tersebut, terdapat juga peran dari *Committee on Foreign Investment in the United States* (CFIUS) sangat penting dalam menilai dan mengawasi risiko keamanan aplikasi asing. CFIUS melakukan audit dan evaluasi terhadap aplikasi yang dinilai berisiko, termasuk Tiktok, untuk memastikan tidak ada akses atau pengaruh yang merugikan keamanan nasional (Mulligan 2023). Dukungan terhadap kebijakan presiden Joe Biden juga terlihat dari legislative yang mengesahkan undang-undang *Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act* (PAFACA) yang memperkuat regulasi terkait pembatasan dan pengawasan aplikasi asing (Paulo 2024). Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk membatasi dan bahkan memblokir aplikasi yang berbahaya termasuk Tiktok. Kebijakan keamanan digital ini menggambarkan perubahan pemahaman mengenai keamanan nasional yang kini telah memasukkan aspek teknologi dan data sebagai suatu sektor strategis yang perlu dilindungi secara serius (Figliola 2023).

Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Joe Biden memandang keamanan digital sebagai bagian dari keamanan nasional Amerika Serikat. Aplikasi digital asing termasuk Tiktok, tidak lagi diposisikan semata sebagai produk teknologi, melainkan sebagai entitas strategis yang berpotensi memengaruhi keamanan data, stabilitas politik, dan kedaulatan digital negara.

4.2 Proses Sekuritisasi Aplikasi Tiktok

Untuk memahami pembentukan kebijakan keamanan digital, penting untuk menelaah proses sekuritisasi berdasarkan teori Copenhagen School. Teori ini menjelaskan bahwa keamanan dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik politik, bukan semata-mata ancaman objektif (Barry Buzan, Ole Waefer 1998). Proses sekuritisasi terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu *speech act*, *audience acceptance*, *referent object*, dan *extraordinary measures*. Tahap *speech act* merupakan pernyataan resmi dari aktor sekuritisasi yang membingkai suatu isu sebagai ancaman keamanan. Pernyataan ini kemudian harus memperoleh *audience acceptance*, yakni penerimaan dan legitimasi dari audiens yang relevan agar klaim ancaman tersebut dapat direspons melalui kebijakan. Selanjutnya, *referent object* merujuk pada objek yang dianggap terancam dan perlu dilindungi, seperti kedaulatan digital dan keamanan data. Proses ini berujung pada penerapan *extraordinary measures*, yaitu tindakan luar biasa yang diambil negara sebagai respons terhadap ancaman yang telah dilegitimasi (Barry Buzan, Ole Waefer 1998).

4.2.1 *Speech Act*

Proses sekuritisasi Tiktok dimulai melalui *speech act* yang dilakukan oleh aktor-aktor negara, khususnya Presiden Joe Biden dan pejabat tinggi pemerintahan Amerika Serikat. Pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa Tiktok menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional, terutama terkait pengumpulan data dan potensi intervensi asing (Walker 2024). Dalam berbagai pernyataan resmi dan dokumen kebijakan, Tiktok dibingkai bukan sebagai aplikasi hiburan semata, melainkan sebagai teknologi asing yang berpotensi menjadi alat pengawasan dan pengaruh politik. Pemerintah menekankan bahwa keterkaitan Tiktok dengan ByteDance dan yurisdiksi hukum Tiongkok menimbulkan kekhawatiran

terhadap kemungkinan akses pemerintah asing terhadap data warga Amerika Serikat. Melalui *speech act* ini, isu Tiktok diangkat dari ranah kebijakan teknologi biasa ke ranah keamanan nasional (Sherman 2025). Pernyataan tersebut berfungsi sebagai alat legitimasi awal yang memungkinkan pemerintah mengambil langkah-langkah luar biasa dalam menangani aplikasi tersebut. Melalui pernyataan-pernyataan tersebut, pemerintah Amerika Serikat secara aktif memproduksi narasi ancaman yang memindahkan isu Tiktok dari ranah kebijakan teknologi ke ranah keamanan nasional.

4.2.2 *Audiens Acceptance*

Setelah presiden Joe Biden menyatakan aplikasi Tiktok sebagai sebuah ancaman, respon audiens berupa lembaga legislative, badan pengawas, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan proses sekuritisasi. Kongres Amerika Serikat menerima narasi ancaman tersebut dengan mengesahkan undang-undang PAFACA yang memperkuat kewenangan pemerintah dalam mengawasi dan membatasi aplikasi yang dikuasai oleh pihak musuh (Paulo 2024). Selain mendapat dukungan dari lembaga legislatif, lembaga seperti CFIUS juga menunjukkan dukungan terhadap *speech act* yang dilakukan oleh presiden Joe Biden melalui audit dan penilaian resiko Teknik yang mendalam terhadap Tiktok (Baker-White 2023). Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai kebebasan digital dan dampak pembatasan, namun narasi ancaman yang dibangun mendapatkan legitimasi yang kuat, yang memungkinkan kebijakan dijalankan dengan efektif (jess bravin 2025). Penerimaan audiens ini menandai keberhasilan tahap sekuritisasi, karena klaim ancaman yang diajukan pemerintah memperoleh legitimasi politik dan institusional.

4.2.3 *Referent Object*

dalam proses ini, objek yang dianggap harus dilindungi adalah kedaulatan digital Amerika Serikat dan privasi data warga negara. Pemerintah Amerika Serikat menempatkan perlindungan terhadap data pribadi dan control infrastruktur digital sebagai hal yang penting untuk di jaga. Dengan menjadikan kedaulatan digital sebagai objek yang harus dijaga

atau dilindungi, pemerintah Amerika Serikat memperluas konsep keamanan nasional hingga mencakup ke sektor digital yang di era sekarang sama pentingnya dengan sektor keamanan tradisional (House 2023). Penjelasan tersebut menegaskan alasan dibaliknya kebijakan pembatasan dan pemblokiran aplikasi Tiktok di Amerika Serikat.

4.2.4 *Extraordinary Measures*

Dalam teori sekuritisasi, suatu isu dapat dikatakan berhasil disekuritisasi apabila negara tidak hanya menyatakan adanya ancaman melalui *speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi, tetapi juga dengan mengambil *extraordinary measures* yaitu tindakan luar biasa yang melampaui mekanisme kebijakan yang normal (Barry Buzan, Ole Wæver 1998). Dalam kebijakan keamanan digital Joe Biden, tindakan luar biasa dapat terlihat dari dukungan legislatif seperti kebijakan PAFACA yang memungkinkan pemerintah Amerika Serikat membatasi memaksa divestasi, hingga memblokir aplikasi asing (Paulo 2024). Tindakan luar biasa juga dapat terlihat dari pembatasan penggunaan aplikasi Tiktok pada perangkat milik pemerintah (Young 2023). Dengan menempatkan pertimbangan keamanan nasional di atas prinsip kebebasan digital, pemerintah Amerika Serikat menunjukkan pergeseran pendekatan kebijakan dari regulasi normal menuju ke suatu tindakan luar biasa (Barry Buzan, Ole Wæver 1998). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk memblokir aplikasi Tiktok merupakan tindakan langsung dari proses sekuritisasi. Dengan demikian, kebijakan pembatasan dan potensi pemblokiran Tiktok mencerminkan penggunaan *extraordinary measures* yang dilegitimasi melalui proses sekuritisasi.

4.3 Kebijakan Keamanan Digital Terhadap Pemblokiran Aplikasi Tiktok

Setelah kebijakan keamanan digital dan pembatasan terhadap Tiktok aplikasi Tiktok dibentuk melalui proses sekuritisasi, tahap selanjutnya ialah implementasi kebijakan tersebut dalam tindakan nyata yang bertujuan mengurangi resiko ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Implementasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa ancaman yang dibangun tidak

hanya menjadi narasi saja, melainkan diwujudkan dalam langkah kongkrit yang berdampak nyata.

Salah satu instrument utama yang digunakan presiden Joe Biden adalah perintah eksekutif 14034. Perintah eksekutif ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap aplikasi asing yang dinilai membahayakan keamanan nasional. Dalam prakteknya, perintah eksekutif ini memungkinkan pemerintah melarang penggunaan Tiktok pada perangkat resmi milik instansi pemerintahan sebagai bentuk tindakan preventif untuk mencegah potensi kebocoran data dan intervensi asing. Larangan ini menjadi simbol kebijakan tegas yang menegaskan bahwa ancaman dari Tiktok diakui secara resmi dan harus direspons secara serius (Biden 2021).

Selain itu, terdapat juga *Committee on Foreign Investment in the United States* (CFIUS) yang berperan penting dalam proses audit dan penilaian resiko teknis secara menyeluruh terhadap aplikasi Tiktok dan Perusahaan induknya yaitu ByteDance (Baker-White 2023). CFIUS mengevaluasi banyak aspek mulai dari sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, hingga mekanisme pengelolaan data. Audit ini dimaksud untuk mengidentifikasi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengakses data warga Amerika Serikat secara ilegal (Baker-White 2023). Hasil penilaian dari CFIUS menjadi rekomendasi kebijakan lanjutan bagi pemerintah termasuk memperluas pembatasan atau memblokir aplikasi sepenuhnya jika resiko yang diberikan sangat signifikan.

Dalam ranah legislatif, pengesahan undang-undang PAFACA oleh kongres Amerika Serikat menjadi instrument hukum yang memperkuat wewenang pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembatasan lebih ketat terhadap aplikasi asing (Paulo 2024). Hal tersebut juga memberikan legitimasi politik yang kuat bagi tindakan pembatasan, hingga pemblokiran aplikasi Tiktok jika terbukti mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Keseluruhan tindakan tersebut memperlihatkan bagaimana proses sekuritisasi yang awalnya bersifat naratif dapat diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang terstruktur dan nyata. Dengan adanya pelarangan penggunaan Tiktok di perangkat pemerintahan, adanya audit teknis dari CFIUS, hingga dukungan legislatif, proses sekuritisasi terbukti efektif

menghubungkan konstruksi ancaman dengan kebijakan nyata yang bertujuan melindungi kedaulatan digital dan keamanan nasional Amerika Serikat.

4.4 Hubungan Proses Sekuritisasi Dengan Kebijakan Pemblokiran Aplikasi Tiktok

Pembahasan ini akan mengaitkan secara langsung tahapan proses sekuritisasi dengan kebijakan pemblokiran Tiktok yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat yang mana kebijakan pemblokiran Tiktok pada masa pemerintahan Joe Biden merupakan hasil dari proses sekuritisasi yang melibatkan pembingkai ancaman dan pengambilan langkah luar biasa. Dalam kerangka teori sekuritisasi, sebuah isu dapat dikategorikan sebagai isu keamanan nasional ketika pemerintah tidak hanya menyebutnya sebagai ancaman, tetapi juga mengambil tindakan khusus yang berada di luar kebijakan normal (Barry Buzan, Ole Waever 1998). Proses ini diawali melalui *speech act*, yaitu pernyataan resmi dari Presiden Joe Biden dan pejabat pemerintah yang menyatakan bahwa Tiktok berpotensi mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Ancaman tersebut dikaitkan dengan risiko akses data warga negara oleh pihak asing dan potensi intervensi terhadap ruang informasi digital. Pernyataan ini mengubah posisi Tiktok dari aplikasi hiburan menjadi isu keamanan nasional (Sherman 2025).

Tahap selanjutnya adalah *audience acceptance*, di mana narasi ancaman tersebut diterima oleh audiens politik seperti Kongres dan lembaga pengawas negara. Penerimaan ini terlihat dari dukungan legislatif serta keterlibatan CFIUS dalam melakukan penilaian dan audit terhadap Tiktok (Baker-White 2023). Dukungan dari audiens ini memberikan legitimasi politik bagi pemerintah untuk mengambil langkah lanjutan. Sebagai tindak lanjut dari proses sekuritisasi, pemerintah mengambil *extraordinary measures* dalam bentuk kebijakan pembatasan dan pemblokiran Tiktok. Tindakan ini meliputi pelarangan penggunaan Tiktok pada perangkat pemerintah, pengawasan ketat terhadap operasional aplikasi, serta pemberian dasar hukum bagi kemungkinan pemblokiran secara lebih luas.

Langkah-langkah tersebut dikategorikan sebagai tindakan luar biasa karena membatasi akses terhadap aplikasi digital yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Dalam proses ini, pemerintah menetapkan kedaulatan digital dan perlindungan data warga negara sebagai *referent object* yang harus dilindungi

(House 2023). Dengan demikian, kebijakan pemblokiran Tiktok dapat dipahami sebagai hasil dari proses sekuritisasi, di mana konstruksi ancaman berujung pada pengambilan langkah luar biasa demi menjaga keamanan nasional di ranah digital.

4.5 Pemblokiran Aplikasi Tiktok Sebagai Bagian Dari Proses Sekuritisasi

Pemblokiran Tiktok dalam kebijakan keamanan digital pada era kepemimpinan Joe Biden dapat dipahami sebagai bagian dari *extraordinary measures* dalam teori sekuritisasi. Dalam kerangka ini, pembatasan penggunaan hingga ancaman pemblokiran Tiktok diposisikan sebagai tindakan di luar kebijakan digital yang bersifat normal, namun dianggap sah dan perlu karena didasarkan pada klaim ancaman terhadap keamanan nasional (Paulo 2024). Negara memperoleh legitimasi untuk mengambil langkah tersebut setelah Tiktok dikonstruksikan sebagai risiko strategis yang berkaitan dengan keamanan data, kedaulatan digital, dan potensi pengaruh asing.

Melalui proses sekuritisasi yang berlangsung secara bertahap, pemerintah Amerika Serikat berhasil membuat persepsi terhadap Tiktok dari sekadar aplikasi hiburan dan media sosial menjadi ancaman keamanan nasional. Pergeseran ini membuka ruang bagi negara untuk menerapkan langkah-langkah luar biasa, seperti pelarangan penggunaan Tiktok pada perangkat pemerintah, peningkatan pengawasan oleh lembaga keamanan, serta wacana pemblokiran secara lebih luas (Young 2023). Langkah-langkah tersebut dapat diterima oleh publik dan institusi politik karena telah dibingkai sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan nasional, sehingga tidak dipersepsikan sebagai pembatasan kebebasan digital yang berlebihan.

Pemblokiran Tiktok dengan demikian tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari wacana ancaman yang konsisten, penerimaan audiens yang relevan, serta dukungan legitimasi hukum dan institusional. Proses ini menunjukkan bahwa kebijakan pemblokiran Tiktok merupakan hasil dari sekuritisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan tersebut mencerminkan bagaimana keamanan digital semakin diposisikan sebagai bagian penting dari kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat di era Joe Biden, khususnya dalam menghadapi tantangan yang berasal dari platform digital dari

negara asing. Hal ini menegaskan bahwa keamanan digital telah menjadi domain strategis dalam kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat di era Joe Biden.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan keamanan digital Amerika Serikat pada era kepemimpinan Joe Biden membingkai aplikasi Tiktok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional melalui proses sekuritisasi. Pemerintah Amerika Serikat mengonstruksikan Tiktok sebagai isu keamanan nasional melalui *speech act* yang menekankan risiko terhadap kedaulatan digital, privasi data warga negara, serta potensi intervensi asing dalam ruang informasi. Narasi ancaman tersebut memperoleh *audience acceptance* dari institusi-institusi politik dan keamanan, terutama Kongres Amerika Serikat dan *Committee on Foreign Investment in the United States* (CFIUS), sehingga memungkinkan isu Tiktok dipindahkan dari ranah kebijakan teknologi ke ranah keamanan nasional, dengan kedaulatan digital dan perlindungan data sebagai *referent object* utama.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa proses sekuritisasi tersebut diwujudkan melalui kebijakan konkret yang bersifat luar biasa (*extraordinary measures*), seperti penerbitan *Executive Order* 14034, keterlibatan CFIUS dalam penilaian risiko keamanan, serta dukungan legislasi melalui undang-undang *Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act* (PAFACA). Instrumen-instrumen kebijakan ini menegaskan bahwa pemblokiran Tiktok bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari strategi keamanan nasional Amerika Serikat di era Joe Biden yang mencerminkan perluasan pandangan keamanan ke ranah digital. Dengan demikian, kebijakan pemblokiran Tiktok dapat dipahami sebagai hasil dari proses sekuritisasi yang dalam konteks keamanan digital Amerika Serikat.

5.2 Saran

Bagi para pembuat kebijakan, perlu adanya penguatan aturan mengenai perlindungan data serta perlunya kerja sama dengan lembaga kompeten lainnya guna mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial. Adapun bagi peneliti selanjutnya, pembahasan ini dapat dikembangkan dengan memperluas aktor yang tidak hanya di pemerintah Amerika Serikat, namun bisa ditambahkan dengan negara lain seperti India, Inggris dan negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Jessica C. 2023. "FAR Council's Interim Rule Bans Use of ByteDance Covered Application in Government Contracting." *Faegre Drinker*.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1):974–80. doi: 10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
- Alenzi, Husein, and Suraya Miskon. 2024. "Government to Citizens Communication via Social Media Platforms : Literature Review." 14(5):1020–35. doi: 10.6007/IJARBSS/v14-i5/21610.
- Aljazeera. 2022. "TikTok Staff Accessed Data to Track Journalists, ByteDance Finds." *Al Jazeera*. Retrieved (<https://www.aljazeera.com/economy/2022/12/23/TikTok-staff-accessed-data-to-track-journalists-bytedance-finds>).
- Allyn, Bobby. 2020. "Trump Signs Executive Order That Will Effectively Ban Use Of TikTok In the U.S." *NPR* 1. Retrieved (<https://www.npr.org/2020/08/06/900019185/trump-signs-executive-order-that-will-effectively-ban-use-of-TikTok-in-the-u-s>).
- Anderson, Nicholas. 2024. "These Are the World's Biggest Social Media Platforms to Consider in 2024." *Ceo World Magazine*. Retrieved (<https://ceoworld.biz/2024/03/02/these-are-the-worlds-biggest-social-media-platforms-to-consider-in-2024/>).
- Association, National Education. 2021. *Deaar Teach Leaders*.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. 2016. "Kebijakan Dan Politik." *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. Retrieved (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>).
- Baker-White, Emily. 2023. "For the Past Several Years the Biden Administration and TikTok Have Been Negotiating a Deal to Resolve National Security Concerns Posed by the Chinese-Owned App. Here's an Exclusive Look inside a Draft of the Deal and What TikTok Might Have to Give up to ." *Forbes*. Retrieved (<https://www.forbes.com/sites/emilybaker-white/2023/08/21/draft-TikTok-cfius-agreement/>).

- barry buzan, ole waefer, jaap de wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*.
- Beasley, Jere. 2023. "Parents Sue Tiktok Claiming The Platform Goaded Their Son Into Killing Himself." *Beasleyallen*. Retrieved (<https://www.beasleyallen.com/publication/jere-beasley-report-may-2023/>).
- Bernot, Ausma, Diarmuid Cooney-O'donoghue, and Monique Mann. 2024. "Governing Chinese Technologies: Tiktok, Foreign Interference, and Technological Sovereignty." *Internet Policy Review* 13(1):0–26. doi: 10.14763/2024.1.1741.
- Bhuiyan, Johana. 2022. "Hy Did the US Just Ban Tiktok from Government-Issued Cellphones?" *The Guardian*. Retrieved (<https://www.theguardian.com/technology/2022/dec/30/explainer-us-congress-Tiktok-ban?>).
- Biden, Joseph. 2021. "Executive Order on Protecting Americans' Sensitive Data from Foreign Adversaries." *White House*.
- Bloombers. 2020. "Tiktok Is A Competitor to Keep an Eye On, Says YouTube CEO." *Bloombers*. Retrieved (<https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-05-28/Tiktok-is-a-competitor-to-keep-an-eye-on-says-youtube-ceo-video>).
- Bond, Shannon. 2024. "China's Influence Operations against the U.S. Are Bigger than Tiktok." *NPR* 1. Retrieved (<https://www.npr.org/2024/04/26/1247347363/china-Tiktok-national-security>).
- Bramwell, Jason. 2024. "Tiktok Ban Not Fully Enforced at the IRS, Report Finds." *Practice Advisor*.
- Ceci, Laura. 2025. "Countries with the Largest Tiktok Audience as of February 2025." *Statista*. Retrieved (<https://www.statista.com/statistics/1299807/number-of-monthly-unique-Tiktok-users/>).
- Denning, dorothy elizabeth robling. 1999. *Information Warfare and Security*. ACM Press.
- Diamond, Scott, Saamir Varma, Francesca, Guerero, and Aaron Mandelbaum.

2024. "President Biden Signs Law That Includes Provisions to Ban Tiktok from the United States." *Thompson Hine*. Retrieved (<https://www.thompsonhinesmartrade.com/2024/04/president-biden-signs-law-that-includes-provisions-to-ban-Tiktok-from-the-united-states/>).
- Donald J. Trump. 2020. "Executive Order on Addressing the Threat Posed by Tiktok." *The White House*.
- Dye, Thomas. 2013. *Understanding Public Policy*.
- Easton, David. 1965. *No Title A Systems Analysis of Political Life*.
- Eddy, Kristen. 2024. "8 Facts about Americans and Tiktok." *Pew Research*. Retrieved (https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/12/20/8-facts-about-americans-and-Tiktok/?gad_source=1&gad_campaignid=22378837192&gbraid=0AAAAA-ddO9Fqrd_u9wcJnJBNHOZCkk9OG&gclid=Cj0KCQiAgvPKBhCxARIsAOLK_ErV2WU4dbxNaNEUZSZ_L11Mu5lx7vODSFRIGUrFOLSfxn_wahk7s8kaAgK2EALw_wcB).
- epic. 2025. "No Title EPIC Needs Your Support to Be an Independent Voice Challenging Big Tech and Government Data." *Epic*. Retrieved (<https://epic.org/campaigns/digital-rights-first/>).
- euronews. 2025. "Which Countries Have Banned Tiktok and Why?" *Euronews*. Retrieved (<https://www.euronews.com/next/2025/01/17/which-countries-have-banned-Tiktok-cybersecurity-data-privacy-espionage-fears>).
- Expert, atlantic council. 2025. "Your Expert Guide to the Debate over Banning Tiktok." *Atlantic Council*. Retrieved (<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/your-expert-guide-to-the-debate-over-banning-Tiktok/>).
- FALLON, PATRICK T. 2024. "Tiktok and National Security." *CSIS*.
- FBI. 2022. *Internet Crime Report 2021*.
- Feiner, Lauren. 2023. "Tiktok CEO Says China-Based ByteDance Employees Still Have Access to Some U.S. Data." *CNBC*. Retrieved (<https://www.cnn.com/2023/03/23/Tiktok-ceo-china-based-bytedance-employees-can-still-access-some-us-data.html?utm>).
- Figliola, Patricia Moloney. 2023. "Tiktok : Technology Overview and Issues

- Tiktok : Technology Overview and Issues.” *Congressional Research Service*. Foreign, From, Adversary Controlled, and Applications Act. 2024. “Presidential Documents.” *Presidential Documents* 89(145):60793–94. doi: 10.4324/9780203122273.
- Fox10, Staff. 2021. “Valley Schools See Rise in Theft, Vandalism Due to ‘devious Licks’ Tiktok Trend.” *Fox 10phoenix*. Retrieved (<https://www.fox10phoenix.com/news/valley-schools-see-rise-in-vandalism-due-to-new-Tiktok-trend>).
- Frandon, Rahmat Gunawan. 2023. “Motivasi Amerika Serikat Memberikan Prasyarat Pada Bytedance Atas Kasus Pemblokiran Tiktok.” *DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS* 1–3.
- Freifeld, Karen. 2021. “Biden Drops Trump Attempt to Ban Tiktok, WeChat; Orders New Review.” *Reuters* 1. Retrieved (<https://www.reuters.com/technology/us-withdrawing-trump-executive-orders-that-sought-ban-Tiktok-wechat-2021-06-09/>).
- Freifeld, Karen, and David Shepardson. 2021. “Biden Drops Trump Attempt to Ban Tiktok, WeChat; Orders New Review.” *Reuters* 1. Retrieved (<https://www.reuters.com/technology/us-withdrawing-trump-executive-orders-that-sought-ban-Tiktok-wechat-2021-06-09/>).
- FTC. 2024. “FTC Investigation Leads to Lawsuit Against Tiktok and ByteDance for Flagrantly Violating Children’s Privacy Law.” *Federal Trade Commission*.
- Gilbert, asha C. .. 2021. “Some Students Face Charges for the ‘slap a Teacher’ Challenge. Now Schools Are Issuing Warnings.” *USA TODAY*. Retrieved (<https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/10/08/slap-teacher-Tiktok-challenge-condemned-Tiktok-and-schools/6048654001/>).
- Globalwitness. 2022. “Tiktok and Facebook Fail to Detect Election Disinformation in the US, While YouTube Succeeds.” *Globalwitness*. Retrieved (<https://globalwitness.org/en/campaigns/digital-threats/Tiktok-and-facebook-fail-to-detect-election-disinformation-in-the-us-while-youtube-succeeds/>).
- Greg Roumeliotis, Yingzhi Yang, Echo Wang and Alexandra Alper. 2019. “Exclusive: U.S. Opens National Security Investigation into Tiktok -

- Sources.” *Reuters*. Retrieved (<https://www.reuters.com/article/technology/exclusive-us-opens-national-security-investigation-into-Tiktok-sources-idUSKBN1XB4IJ/>).
- Guardian, The. 2022. “Tiktok Admits Using Its App to Spy on Reporters in Effort to Track Leaks.” *The Guardian*. Retrieved (<https://www.theguardian.com/technology/2022/dec/22/Tiktok-bytedance-workers-fired-data-access-journalists>).
- Hale, Jacob. 2022. “Facebook Reportedly Paying for Smear Campaign against Tiktok over ‘Dangerous’ Trends.” *Dexerto*.
- Heath, mia sato. ale. 2022. “Meta Warns Employees of ‘Serious Times’ in Internal Memo Listing Key Product Bets‘We Are in Serious Times Here and the Headwinds Are Fierce.’” *The Verge*. Retrieved (<https://www.theverge.com/2022/6/30/23190164/meta-chris-cox-internal-memo-product-bets-Tiktok-metaverse>).
- Hermann, charles. f. 1969. “Defining National Security.”
- Hern, Alex. 2022. “How Tiktok’s Algorithm Made It a Success: ‘It Pushes the Boundaries.’” *The Guardian*. Retrieved (<https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/23/Tiktok-rise-algorithm-popularity>).
- Hooda, Khyati. 2024. “71 Powerful Tiktok Stats For 2025 & Beyond.” *Keywords Everywhere*. Retrieved (<https://keywordseverywhere.com/blog/Tiktok-stats/>).
- Hough, Peter. 1966. *Understanding Global Security*.
- House, Biden White. 2024. *Memorandum on the Delegation of Authority Under the Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act*.
- House, the white. 2023. “NATIONAL CYBERSECURITY STRATEGY.” (March).
- Hub, influencer marketing. 2024. “The Incredible Rise of Tiktok – [Tiktok Growth Visualization].” *Influencer Marketing Hub* 1. Retrieved (<https://influencermarketinghub.com/Tiktok-growth/>).
- Ichiwan, Rahmadhaniah Putri, and Rizki Dian Nursita. 2023. “Sekuritisasi Tiktok Di Amerika Serikat Di Masa Pemerintahan Donald Trump Pada Tahun 2020.” *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations* 6:20–50.

- irma indrayanti, tasya maharani. 2022. "The United State's National Security Protection from Cyber Crime Threats a Case Study of Tiktok Banning Submission by the President Donald Trump in 2020." *Journal of Social and Political Scienc* 3.
- Jaffe, Chris. 2020. "Building YouTube Shorts, a New Way to Watch & Create on YouTube." *Blog. Youtube.* Retrieved (https://www.google.com/search?q=Building+YouTube+Shorts%2C+a+new+way+to+watch+%26+create+on+YouTube&oq=Building+YouTube+Shorts%2C+a+new+way+to+watch+%26+create+on+YouTube&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDI5NDVqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
- Jelita, insa nantika. 2021. "Biden Cabut Perintah Eksekutif Trump Soal Pelarangan Tiktok." *Medcom.Id.* Retrieved (<https://www.medcom.id/internasional/amerika/aNr9oXzK-biden-cabut-perintah-eksekutif-trump-soal-pelarangan-Tiktok>).
- jess bravin, jacob gershman. 2025. "Supreme Court Appears Skeptical of Tiktok's Arguments Against Ban." *WJS*. Retrieved (<https://www.wsj.com/us-news/law/Tiktok-ban-supreme-court-hearing-9b19b618>).
- jing zhou , silin ye , xiaming liu, yuqi tang. 2024. "The Role of Social Media in CSR Performance: An Integrated Institutional and Resource Dependence Perspective." *Journal of Business Research* 184.
- Kemp, Simon. 2024. "Digital 2024: The United States of America." *Datareportal* 1.
- Kerr, Dara. 2023. "Lawmakers Grilled Tiktok CEO Chew for 5 Hours in a High-Stakes Hearing about the App." *NPR* 1. Retrieved (<https://www.npr.org/2023/03/23/1165579717/Tiktok-congress-hearing-shou-zi-chew-project-texas>).
- Kim, Thomas. 2024. "One Year in, Revenue Sharing on Shorts Shows How Your Passion on YouTube Pays Off." *Blog Youtube.*
- Kohne, By Natasha G., Katherine Penberthy Padgett, David C. Vondle, Shiva Aminian, and Christian C. Davis. 2021. "Biden Issues Executive Order Redirecting and Clarifying Scrutiny of Chinese Apps." *Akin* 14034.

- Kongres, Layanan Penelitian. 2023. "Tiktok : Tinjauan Dan Masalah Teknologi Tiktok : Tinjauan Dan Masalah Teknologi." *Congressional Reaserch Service*.
- Learly, jhon mckinnon dan alex. 2021. "Trump's Tiktok, WeChat Actions Targeting China Revoked by Biden." *Wall Street Journal* 1. Retrieved (<https://www.wsj.com/politics/policy/biden-revokes-trump-actions-targeting-tiktok-wechat-11623247225>).
- Marples, Megan. 2021. "The 'Devious Licks' Tiktok Challenge Has Students Stealing Toilets and Vandalizing Bathrooms." *Cnn*. Retrieved (<https://edition.cnn.com/2021/09/18/health/devious-licks-Tiktok-challenge-wellness>).
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- May, Updated. 2024. "Legal Sidebari Regulation of Tiktok Under the Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act : Analysis of Selected Legal Issues." *Congressional Research and Service*.
- Mcclain, Colleen. 2023. "Majority of Americans Say Tiktok Is a Threat to National Security." *Pew Research*. Retrieved (https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/07/10/majority-of-americans-say-Tiktok-is-a-threat-to-national-security/?gad_source=1&gad_campaignid=22378837192&gbraid=0AAAAA-ddO9FQLDhfsenQx4VtsFa3HU9rJ&gclid=Cj0KCQiAgbnKBhDgARIsAGC DdlfLnbIDh7qQm3TkWyI67WfMPdzaH9Db8S3eYjkcIXw-qgidLNZKdgEaAhzjEALw_wcB).
- McClain, Colleen, Monica Anderson, And, and Risa Gelles-Watnick. 2024. "How Tiktok Users View, Experience the Platform." *Pew Research*. Retrieved (https://www.pewresearch.org/internet/2024/06/12/how-Tiktok-users-view-experience-the-platform/?gad_source=1&gad_campaignid=22378837192&gbraid=0AAAAA-ddO9G6QdjL5KRxHkqoQbI_pgCmD&gclid=Cj0KCQiAvOjKBhC9ARIsAFvz5lhjhId6kQs7OdknHBOBHZM1XGJb9FRIdue5vb9vbEDxcrJoiZD4pd8aAh7jEALw_wcB).

- Meta. 2023. "Helping Creators Get Discovered and Earn Money on Facebook." *Meta*.
- Milmo, Dan. 2022. "Tiktok Denies Report Data Used to Track or 'Target' US Citizens." *The Guardian*. Retrieved (<https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/21/Tiktok-denies-report-data-used-to-track-or-target-us-citizens-bytedance>).
- Mulligan, Steve P. 2023. "Restricting Tiktok." *Congress*. Retrieved (<https://www.congress.gov/crs-product/LSB10940>).
- Murphy, Hannah. 2022. "Tiktok Admits Tracking FT Journalist in Leaks Investigation." *Financial Times*. Retrieved (<https://www.ft.com/content/e873b98a-9623-45b3-b97c-444a2fde5874>).
- Murtaza, Fawad. 2022. "'The Headwinds Are Fierce': Meta Alerts Employees about Tough Times Ahead in Leaked Internal Memo." *Notebook Check*.
- NBC, Staff. 2023. "Long Island Parents Sue Tiktok, Claim Videos Glorifying Suicide Led to Teen's Death." *NBC New York*. Retrieved (<https://www.nbcnewyork.com/news/local/long-island-family-sues-Tiktok-says-videos-glorifying-suicide-led-to-teens-suicide/4177564/>).
- News, Cbs. 2021. "Tiktok-Inspired 'Slap A Teacher' Challenge Assault Reported At Braintree's East Middle School." *Cbs News*. Retrieved (<https://www.cbsnews.com/boston/news/Tiktok-slap-a-teacher-challenge-braintree/>).
- News, Cbs. 2022. "Report: Facebook Hired PR Firm To Smear Tiktok." *Cbc News*.
- Newsroom, NTD. 2023. "IRS Not Complying With 'No Tiktok Act' on Government Devices, Report Finds." *NTD*. Retrieved (<https://www.ntd.com/irs-not-complying-with-no-Tiktok-act-on-government-devices-report-finds>).
- Nist. 2021. "Improving the Nation's Cybersecurity: NIST's Responsibilities Under the May 2021 Executive Order." *Nist*. Retrieved (<https://www.nist.gov/itl/executive-order-14028-improving-nations-cybersecurity>).
- Oladipo, Gloria. 2022. "Facebook Owner Reportedly Paid Republican Firm to Push Message Tiktok Is 'the Real Threat.'" *The Guardian*. Retrieved

(<https://www.theguardian.com/technology/2022/mar/30/facebook-owner-reportedly-paid-republican-firm-Tiktok-real-threat>).

Paul, Kari. 2022a. "From Dance Videos to Global Sensation: What You Need to Know about Tiktok's Rise." *The Guardian*. Retrieved (<https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/22/Tiktok-history-rise-algorithm-misinformation>).

Paul, Kari. 2022b. "'We Risk Another Crisis': Tiktok in Danger of Being Major Vector of Election Misinformation." *The Guardian*. Retrieved (<https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/24/Tiktok-election-misinformation-voting-politics>).

Paul, Katie. 2022. "Exclusive: Meta Slashes Hiring Plans, Girds for 'fierce' Headwinds." *Reuters*. Retrieved (<https://www.reuters.com/technology/exclusive-meta-girds-fierce-headwinds-slower-growth-second-half-memo-2022-06-30/>).

Paulo, Mazzotti. 2024. "The 'Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act' (PAFACAA): 'Tiktok Ban' or New Milestone in US Economic Security Law?" *Celis Institute* 1. Retrieved (<https://www.celis.institute/celis-blog/the-protecting-americans-from-foreign-adversary-controlled-applications-act-pafacaa-Tiktok-ban-or-new-milestone-in-us-economic-security-law-2/>).

Perault, Matt. 2024. "What Happened to Tiktok's Project Texas?" *Law Fare*. Retrieved (<https://www.lawfaremedia.org/article/what-happened-to-Tiktok-s-project-texas>).

Perez, Sarah. 2021. "Walmart to Host a New Livestream Shopping Event on Tiktok, Following Successful Pilot." *TechCrunch*. Retrieved (<https://techcrunch.com/2021/03/09/walmart-to-host-a-new-live-stream-shopping-event-on-Tiktok-following-successful-pilot/>).

Perrett, Connor. 2022. "The 'slap a Teacher' Tiktok Challenge Was Never Real, but Rumors at One High School Started a Nationwide Panic." *Business Insider*. Retrieved (<https://www.businessinsider.com/slap-a-teacher-Tiktok-fake-nationwide-panic-2022-7>).

Popli, Nik. 2022. "Meta, Tiktok, Dan Twitter Berharap Melawan Misinformasi

- Pemilu. Para Ahli Mengatakan Rencana Mereka Belum Cukup.” *Time*.
- President, The. 2021. “Improving the Nation’s Cybersecurity.” *Presidential Documents Executive* 86(93):26633–47.
- Press, Associated. 2024a. “Biden Campaign Joins Tiktok, but Administration Still Warns of App’s National Security Concerns.” *Pbs Newss*.
- Press, Associated. 2024b. “Justice Department Says Tiktok Collected US User Views on Issues like Abortion and Gun Control.” *Politico*. Retrieved (<https://www.politico.com/news/2024/07/27/doj-Tiktok-collected-user-views>).
- Price, Emily. 2018. “Musical.Ly and Tiktok Are Merging into a Short-Video Powerhouse.” *Fast Company* 1. Retrieved (<https://www.fastcompany.com/90212600/musical-ly-and-Tiktok-are-merging-into-a-short-video-powerhouse>).
- Rahmawati, futika ari. 2021. “DINAMIKA MEDIA SOSIAL TIKTOK 2.1.” *Hubungan Internasional* 2(2):135–48.
- ravpreet kaur, brand statistics. 2024. “Tiktok Statistics: Usage, Revenue, & Key Facts.” *Feeddough*. Retrieved (<https://www.feeddough.com/Tiktok-statistics-usage-revenue-key-facts/>).
- Release, Press. 2024a. “Gallagher, Bipartisan Coalition Introduce Legislation to Protect Americans From Foreign Adversary Controlled Applications, Including Tiktok.” *Select Committee on the Ccp*. Retrieved (<https://selectcommitteeontheccp.house.gov/media/press-releases/gallagher-bipartisan-coalition-introduce-legislation-protect-americans-0>).
- Release, Press. 2024b. “Rep. Cammack Joins Bipartisan Coalition In Introducing Legislation To Protect Americans From Foreign Adversary Controlled Applications, Including Tiktok.” *Cammack.House*. Retrieved (<https://cammack.house.gov/media/press-releases/rep-cammack-joins-bipartisan-coalition-introducing-legislation-protect>).
- Reuters. 2024a. “US Appeals Court Upholds Tiktok Law Forcing Its Sale.” *Aljazeera*.
- Reuters. 2024b. “US Government Says Tiktok Poses Threat to National Security.” *Deutsche Welle*.

- Reuters. 2025. "US Supreme Court Upholds Law Banning Tiktok." *Reuters*. Retrieved (<https://www.aljazeera.com/economy/2025/1/17/us-supreme-court-upholds-law-banning-Tiktok>).
- Riotta, Chris. 2023. "The White House Will Officially Ban Tiktok From Government Devices Within 30 Days." *Government Executive*.
- Rodriguez, Katherine. 2021. "What Is the 'Devious Lick' Tiktok Trend? What Does It Mean? Here's What to Know." *Nj.Com*. Retrieved (<https://www.nj.com/news/2021/09/what-is-the-devious-lick-Tiktok-trend-what-does-it-mean-heres-what-to-know.html>).
- Russell, Jon. 2018. "Short Video Service Musical.ly Is Merging into Sister App Tiktok." *TechCrunch*. Retrieved (<https://techcrunch.com/2018/08/02/musically-Tiktok/>).
- Saputra, Wyanne Teresita. 2021. "IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN APLIKASI TIKTOK OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HUBUNGAN TIONGKOK DAN AMERIKA SERIKAT DISEKTOR KEAMANAN RUANG SIBER: BYTEDANCE, TIONGKOK." *FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA*.
- Service, congressional reasearch. 2023. "Tiktok: Recent Data Privacy and National Security Concerns." *Congressional Research Service*.
- Sheera, Raymond Zhong and. 2020. "A Third of Tiktok's U.S. Users May Be 14 or Under, Raising Safety Questions." *The New York Times*. Retrieved (<https://www.nytimes.com/2020/08/14/technology/Tiktok-underage-users-ftc.html>).
- Shepardson, David. 2022. "ByteDance Finds Employees Obtained Tiktok User Data of Two Journalists." *Routers*. Retrieved (<https://www.reuters.com/technology/bytedance-finds-employees-obtained-Tiktok-user-data-two-us-journalists-2022-12-22/>).
- Sherman, Mark. 2025. "Tiktok Says It Will 'Go Dark' Unless It Gets Clarity from Biden Following Supreme Court Ruling." *Ap News*. Retrieved (<https://apnews.com/article/supreme-court-Tiktok-china-security-speech-166f7c794ee587d3385190f893e52777>).

- Singer, Amy. 2021. "Introducing the YouTube Shorts Fund." *Blog. Youtube*.
- Sohail, Daniyal. 2022. "YouTube Sees 'Really Strong Competition' From China's Tiktok - CEO." *Urdu Point*.
- Soros, George. 2022. "Facebook Resorts to Old Smear Tactics against Tiktok." *Ksat.Com*. Retrieved (<https://www.ksat.com/news/politics/2022/03/30/facebook-resorts-to-old-smear-tactics-against-Tiktok/>).
- Sugiono. 2013. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. alfabetawild.
- Swanda, Zidan Maulidan. 2023. "Amerika Serikat vs Tiktok: Sebuah Analisis Melalui Perspektif Neorealisme." *Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga* 1(2):7.
- Team, WDSU digital. 2021. "Covington Police: Disabled Teacher Injured in Suspected Tiktok Challenge Assault by Student." *WDSU News*. Retrieved (<https://www.wdsu.com/article/covington-police-teacher-student-injured-tiktok-challenge/37895519>).
- Wæver, Ole. 2002. "Securitization and Desecuritization." *Journal on Security* 1–31.
- Walker, Liana. 2024. "Joe Biden Has Signed Legislation Banning Tiktok, so What Happens Now." *Abc. Net*. Retrieved (<https://www.abc.net.au/news/2024-04-25/joe-biden-signs-legislation-banning-tik-tok-explained/103769240>).
- Walker, Peter. 2020. "Walmart Buys 7.5% Share in New Tiktok US Entity." *Retail System*. Retrieved (https://www.retail-systems.com/rs/Walmart_Invests_Tiktok_Global_New_Company_US.php).
- walmart. 2020. "Walmart Statement About Potential Investment in and Commercial Agreements with Tiktok Global." *Walmart*.
- Walmart. 2024. "How We're Bringing the Power of Walmart Connect to Tiktok." *Walmart*. Retrieved (<https://www.walmartconnect.com/bringing-the-power-of-walmart-connect-to-Tiktok>).
- Waltz, Kenneth N. 1959. *Man, the State, and War*.
- Williams, Robert. 2022. "How YouTube's Brewing Tiktok Rivalry Could Impact Mobile Video Strategies." *Marketing Dave*. Retrieved

- (<https://www.marketingdive.com/news/how-youtubes-brewing-Tiktok-rivalry-could-impact-mobile-video-strategies/625854/>).
- Wire, Bussines. 2023. "Social Media Victims Law Center Sues ByteDance and Tiktok in the Death of 16-Year-Old Chase Nasca; Parents Travel to Washington D.C. to Hear Congressional Testimony of Tiktok CEO." *Bussines Wire*. Retrieved (<https://www.businesswire.com/news/home/20230321005908/en/Social-Media-Victims-Law-Center-Sues-ByteDance-and-Tiktok-in-the-Death-of-16-Year-Old-Chase-Nasca-Parents-Travel-to-Washington-D.C.-to-Hear-Congressional-Testimony-of-Tiktok-CEO>).
- Young, Shalanda D. 2023. "MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS." *Research in International Economics by Federal Agencies*. doi: 10.7312/schw92626-011.
- Zealand, New, Homeland Security, Attorney General, U. S. Trade, and Arab Emirates. 2025. "Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS)." *Congressional Reaserch Service*.
- Abraham, jessica C. 2023. "FAR Council's Interim Rule Bans Use of ByteDance Covered Application in Government Contracting." *Faegre Drinker*.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1):974–80. doi: 10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
- Alenzi, Husein, and Suraya Miskon. 2024. "Government to Citizens Communication via Social Media Platforms : Literature Review." 14(5):1020–35. doi: 10.6007/IJARBSS/v14-i5/21610.
- Aljazeera. 2022. "Tiktok Staff Accessed Data to Track Journalists, ByteDance Finds." *Al Jazeerah*. Retrieved (<https://www.aljazeera.com/economy/2022/12/23/Tiktok-staff-accessed-data-to-track-journalists-bytedance-finds>).
- Allyn, Bobby. 2020. "Trump Signs Executive Order That Will Effectively Ban Use Of Tiktok In the U.S." *NPR* 1. Retrieved (<https://www.npr.org/2020/08/06/900019185/trump-signs-executive-order-that-will-effectively-ban-use-of-Tiktok-in-the-u-s>).
- Anderson, Nicholas. 2024. "These Are the World's Biggest Social Media Platforms to Consider in 2024." *Ceo World Magazine*. Retrieved (<https://ceoworld.biz/2024/03/02/these-are-the-worlds-biggest-social-media->

platforms-to-consider-in-2024/).

Association, national education. 2021. *Dear Teach Leaders*.

Bahasa, badan pengembangan dan pembinaan. 2016. "Kebijakan Dan Politik." *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. Retrieved (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>).

Baker-White, Emily. 2023. "For the Past Several Years the Biden Administration and Tiktok Have Been Negotiating a Deal to Resolve National Security Concerns Posed by the Chinese-Owned App. Here's an Exclusive Look inside a Draft of the Deal and What Tiktok Might Have to Give up to ." *Forbes*. Retrieved (<https://www.forbes.com/sites/emilybaker-white/2023/08/21/draft-Tiktok-cfius-agreement/>).

barry buzan, ole waefer, jaap de wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*.

Beasley, Jere. 2023. "Parents Sue Tiktok Claiming The Platform Goaded Their Son Into Killing Himself." *Beasleyallen*. Retrieved (<https://www.beasleyallen.com/publication/jere-beasley-report-may-2023/>).

Bernot, Ausma, Diarmuid Cooney-O'donoghue, and Monique Mann. 2024. "Governing Chinese Technologies: Tiktok, Foreign Interference, and Technological Sovereignty." *Internet Policy Review* 13(1):0–26. doi: 10.14763/2024.1.1741.

Bhuiyan, Johana. 2022. "Hy Did the US Just Ban Tiktok from Government-Issued Cellphones?" *The Guardian*. Retrieved (<https://www.theguardian.com/technology/2022/dec/30/explainer-us-congress-Tiktok-ban?>).

Biden, Joseph. 2021. "Executive Order on Protecting Americans' Sensitive Data from Foreign Adversaries." *White House*.

Bloombers. 2020. "Tiktok Is A Competitor to Keep an Eye On, Says YouTube CEO." *Bloombers*. Retrieved (<https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-05-28/Tiktok-is-a-competitor-to-keep-an-eye-on-says-youtube-ceo-video>).

Bond, Shannon. 2024. "China's Influence Operations against the U.S. Are Bigger than Tiktok." *NPR* 1. Retrieved (<https://www.npr.org/2024/04/26/1247347363/china-Tiktok-national-security>).

Bramwell, Jason. 2024. "Tiktok Ban Not Fully Enforced at the IRS, Report Finds." *Practice Advisor*.

Ceci, Laura. 2025. "Countries with the Largest Tiktok Audience as of February 2025." *Statista*. Retrieved (<https://www.statista.com/statistics/1299807/number-of-monthly-unique-Tiktok-users/>).

Denning, dorothy elizabeth robling. 1999. *Information Warfare and Security*. ACM Press.

Diamond, Scott, Saamir Varma, Francesca, Guerero, and Aaron Mandelbaum. 2024. "President Biden Signs Law That Includes Provisions to Ban Tiktok from the United

- States.” *Thompson Hine*. Retrieved (<https://www.thompsonhinesmartrade.com/2024/04/president-biden-signs-law-that-includes-provisions-to-ban-Tiktok-from-the-united-states/>).
- Donald J. Trump. 2020. “Executive Order on Addressing the Threat Posed by Tiktok.” *The White House*.
- Dye, Thomas. 2013. *Understanding Public Policy*.
- Easton, David. 1965. *No Title A Systems Analysis of Political Life*.
- Eddy, Kristen. 2024. “8 Facts about Americans and Tiktok.” *Pew Research*. Retrieved (https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/12/20/8-facts-about-americans-and-Tiktok/?gad_source=1&gad_campaignid=22378837192&gbraid=0AAAAA-ddO9Fqrd_u9wcJnJBHNOZCkk9OG&gclid=Cj0KCQiAgvPKBhCxARIsAOIK_ErV2WU4dbxNaNEUZSZ_L11Mu5lx7vODSFRIGUrFOLSfxn_wahk7s8kaAgK2EALw_wcB).
- epic. 2025. “No Title EPIC Needs Your Support to Be an Independent Voice Challenging Big Tech and Government Data.” *Epic*. Retrieved (<https://epic.org/campaigns/digital-rights-first/>).
- euronews. 2025. “Which Countries Have Banned Tiktok and Why?” *Euronews*. Retrieved (<https://www.euronews.com/next/2025/01/17/which-countries-have-banned-Tiktok-cybersecurity-data-privacy-espionage-fears>).
- Expert, athletic council. 2025. “Your Expert Guide to the Debate over Banning Tiktok.” *Athletic Council*. Retrieved (<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/your-expert-guide-to-the-debate-over-banning-Tiktok/>).
- FALLON, PATRICK T. 2024. “Tiktok and National Security.” *CSIS*.
- FBI. 2022. *Internet Crime Report 2021*.
- Feiner, Lauren. 2023. “Tiktok CEO Says China-Based ByteDance Employees Still Have Access to Some U.S. Data.” *CNBC*. Retrieved (<https://www.cnbc.com/2023/03/23/Tiktok-ceo-china-based-bytedance-employees-can-still-access-some-us-data.html?utm>).
- Figliola, Patricia Moloney. 2023. “Tiktok : Technology Overview and Issues Tiktok : Technology Overview and Issues.” *Congressional Research Service*.
- Foreign, From, Adversary Controlled, and Applications Act. 2024. “Presidential Documents.” *Presidential Documents* 89(145):60793–94. doi: 10.4324/9780203122273.
- Fox10, Staff. 2021. “Valley Schools See Rise in Theft, Vandalism Due to ‘devious Licks’ Tiktok Trend.” *Fox 10 phoenix*. Retrieved (<https://www.fox10phoenix.com/news/valley-schools-see-rise-in-vandalism-due-to-new-Tiktok-trend>).

- Frandon, Rahmat Gunawan. 2023. "Motivasi Amerika Serikat Memberikan Prasyarat Pada Bytedance Atas Kasus Pemblokiran Tiktok." *DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS* 1–3.
- Freifeld, Karen. 2021. "Biden Drops Trump Attempt to Ban Tiktok, WeChat; Orders New Review." *Reuters* 1. Retrieved (<https://www.reuters.com/technology/us-withdrawing-trump-executive-orders-that-sought-ban-Tiktok-wechat-2021-06-09/>).
- Freifeld, Karen, and David Shepardson. 2021. "Biden Drops Trump Attempt to Ban Tiktok, WeChat; Orders New Review." *Reuters* 1. Retrieved (<https://www.reuters.com/technology/us-withdrawing-trump-executive-orders-that-sought-ban-Tiktok-wechat-2021-06-09/>).
- FTC. 2024. "FTC Investigation Leads to Lawsuit Against Tiktok and ByteDance for Flagrantly Violating Children's Privacy Law." *Federal Trade Commission*.
- Gilbert, asha C. .. 2021. "Some Students Face Charges for the 'slap a Teacher' Challenge. Now Schools Are Issuing Warnings." *USA TODAY*. Retrieved (<https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/10/08/slap-teacher-Tiktok-challenge-condemned-Tiktok-and-schools/6048654001/>).
- Globalwitness. 2022. "Tiktok and Facebook Fail to Detect Election Disinformation in the US, While YouTube Succeeds." *Globalwitness*. Retrieved (<https://globalwitness.org/en/campaigns/digital-threats/Tiktok-and-facebook-fail-to-detect-election-disinformation-in-the-us-while-youtube-succeeds/>).
- Greg Roumeliotis, Yingzhi Yang, Echo Wang and Alexandra Alper. 2019. "Exclusive: U.S. Opens National Security Investigation into Tiktok - Sources." *Reuters*. Retrieved (<https://www.reuters.com/article/technology/exclusive-us-opens-national-security-investigation-into-Tiktok-sources-idUSKBN1XB4IJ/>).
- Guardian, The. 2022. "Tiktok Admits Using Its App to Spy on Reporters in Effort to Track Leaks." *The Guardian*. Retrieved (<https://www.theguardian.com/technology/2022/dec/22/Tiktok-bytedance-workers-fired-data-access-journalists>).
- Hale, Jacob. 2022. "Facebook Reportedly Paying for Smear Campaign against Tiktok over 'Dangerous' Trends." *Dexerto*.
- Heath, mia sato. ale. 2022. "Meta Warns Employees of 'Serious Times' in Internal Memo Listing Key Product Bets 'We Are in Serious Times Here and the Headwinds Are Fierce.'" *The Verge*. Retrieved (<https://www.theverge.com/2022/6/30/23190164/meta-chris-cox-internal-memo-product-bets-Tiktok-metaverse>).
- Hermann, charles. f. 1969. "Defining National Security."
- Hern, Alex. 2022. "How Tiktok's Algorithm Made It a Success: 'It Pushes the Boundaries.'" *The Guardian*. Retrieved

- (<https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/23/Tiktok-rise-algorithm-popularity>).
- Hooda, Khyati. 2024. "71 Powerful Tiktok Stats For 2025 & Beyond." *Keywords Everywhere*. Retrieved (<https://keywordseverywhere.com/blog/Tiktok-stats/>).
- Hough, Peter. 1966. *Understanding Global Security*.
- House, Biden White. 2024. *Memorandum on the Delegation of Authority Under the Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act*.
- House, the White. 2023. "NATIONAL CYBERSECURITY STRATEGY." (March).
- Hub, Influencer Marketing. 2024. "The Incredible Rise of Tiktok – [Tiktok Growth Visualization]." *Influencer Marketing Hub* 1. Retrieved (<https://influencermarketinghub.com/Tiktok-growth/>).
- Ichiwan, Rahmadhaniah Putri, and Rizki Dian Nursita. 2023. "Sekuritisasi Tiktok Di Amerika Serikat Di Masa Pemerintahan Donald Trump Pada Tahun 2020." *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations* 6:20–50.
- Irma Indrayanti, Tasya Maharani. 2022. "The United State's National Security Protection from Cyber Crime Threats a Case Study of Tiktok Banning Submission by the President Donald Trump in 2020." *Journal of Social and Political Science* 3.
- Jaffe, Chris. 2020. "Building YouTube Shorts, a New Way to Watch & Create on YouTube." *Blog. Youtube*. Retrieved (https://www.google.com/search?q=Building+YouTube+Shorts%2C+a+new+way+to+watch+%26+create+on+YouTube&oq=Building+YouTube+Shorts%2C+a+new+way+to+watch+%26+create+on+YouTube&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDI5NDVqMGo0qAIAAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
- Jelita, Insa Nantika. 2021. "Biden Cabut Perintah Eksekutif Trump Soal Pelarangan Tiktok." *Medcom.Id*. Retrieved (<https://www.medcom.id/internasional/amerika/aNr9oXzK-biden-cabut-perintah-eksekutif-trump-soal-pelarangan-Tiktok>).
- Jess Bravin, Jacob Gershman. 2025. "Supreme Court Appears Skeptical of Tiktok's Arguments Against Ban." *WJS*. Retrieved (<https://www.wsj.com/us-news/law/Tiktok-ban-supreme-court-hearing-9b19b618>).
- Jing Zhou, Silin Ye, Xiaming Liu, Yuqi Tang. 2024. "The Role of Social Media in CSR Performance: An Integrated Institutional and Resource Dependence Perspective." *Journal of Business Research* 184.
- Kemp, Simon. 2024. "Digital 2024: The United States of America." *Datareportal* 1.
- Kerr, Dara. 2023. "Lawmakers Grilled Tiktok CEO Chew for 5 Hours in a High-Stakes Hearing about the App." *NPR* 1. Retrieved (<https://www.npr.org/2023/03/23/1165579717/Tiktok-congress-hearing-shou-zi-chew-project-texas>).

- Kim, Thomas. 2024. "One Year in, Revenue Sharing on Shorts Shows How Your Passion on YouTube Pays Off." *Blog Youtube*.
- Kohne, By Natasha G., Katherine Penberthy Padgett, David C. Vondle, Shiva Aminian, and Christian C. Davis. 2021. "Biden Issues Executive Order Redirecting and Clarifying Scrutiny of Chinese Apps." *Akin* 14034.
- Kongres, Layanan Penelitian. 2023. "Tiktok : Tinjauan Dan Masalah Teknologi Tiktok : Tinjauan Dan Masalah Teknologi." *Congressional Reaserch Service*.
- Learly, jhon mckinnon dan alex. 2021. "Trump's Tiktok, WeChat Actions Targeting China Revoked by Biden." *Wall Street Journal* 1. Retrieved (<https://www.wsj.com/politics/policy/biden-revokes-trump-actions-targeting-tiktok-wechat-11623247225>).
- Marples, Megan. 2021. "The 'Devious Licks' Tiktok Challenge Has Students Stealing Toilets and Vandalizing Bathrooms." *Cnn*. Retrieved (<https://edition.cnn.com/2021/09/18/health/devious-licks-tiktok-challenge-wellness>).
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- May, Updated. 2024. "Legal Sidebari Regulation of Tiktok Under the Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act: Analysis of Selected Legal Issues." *Congressional Research and Service*.
- Mcclain, Colleen. 2023. "Majority of Americans Say Tiktok Is a Threat to National Security." *Pew Research*. Retrieved (https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/07/10/majority-of-americans-say-tiktok-is-a-threat-to-national-security/?gad_source=1&gad_campaignid=22378837192&gbraid=0AAAAA-ddO9FQLDhfsenQx4VtsFa3HU9rJ&gclid=Cj0KCQiAgbnKBhDgARIsAGCDdlFLnbIDh7qQm3TkWyI67WfMPdzaH9Db8S3eYjklXw-qgidLNZKdgEaAhzjEALw_wcB).
- McClain, Colleen, Monica Anderson, And, and Risa Gelles-Watnick. 2024. "How Tiktok Users View, Experience the Platform." *Pew Research*. Retrieved (https://www.pewresearch.org/internet/2024/06/12/how-tiktok-users-view-experience-the-platform/?gad_source=1&gad_campaignid=22378837192&gbraid=0AAAAA-ddO9G6QdjL5KRxHkqoQbI_pgCmD&gclid=Cj0KCQiAvOjKBhC9ARIsAFvz5lhjhid6kQs7OdknHBOBHZM1XGJb9FRIdue5vb9vbEDxcrJoiZD4pd8aAh7jEALw_wcB).
- Meta. 2023. "Helping Creators Get Discovered and Earn Money on Facebook." *Meta*.
- Milmo, Dan. 2022. "Tiktok Denies Report Data Used to Track or 'Target' US Citizens." *The Guardian*. Retrieved (<https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/21/tiktok-denies-report-data>).

used-to-track-or-target-us-citizens-bytedance).

Mulligan, Steve P. 2023. "Restricting Tiktok." *Congress*. Retrieved (<https://www.congress.gov/crs-product/LSB10940>).

Murphy, Hannah. 2022. "Tiktok Admits Tracking FT Journalist in Leaks Investigation." *Financial Times*. Retrieved (<https://www.ft.com/content/e873b98a-9623-45b3-b97c-444a2fde5874>).

Murtaza, Fawad. 2022. "'The Headwinds Are Fierce': Meta Alerts Employees about Tough Times Ahead in Leaked Internal Memo." *Notebook Check*.

NBC, Staff. 2023. "Long Island Parents Sue Tiktok, Claim Videos Glorifying Suicide Led to Teen's Death." *NBC New York*. Retrieved (<https://www.nbcnewyork.com/news/local/long-island-family-sues-Tiktok-says-videos-glorifying-suicide-led-to-teens-suicide/4177564/>).

News, Cbs. 2021. "Tiktok-Inspired 'Slap A Teacher' Challenge Assault Reported At Braintree's East Middle School." *Cbs News*. Retrieved (<https://www.cbsnews.com/boston/news/Tiktok-slap-a-teacher-challenge-braintree/>).

News, Cbs. 2022. "Report: Facebook Hired PR Firm To Smear Tiktok." *Cbc News*.

Newsroom, NTD. 2023. "IRS Not Complying With 'No Tiktok Act' on Government Devices, Report Finds." *NTD*. Retrieved (<https://www.ntd.com/irs-not-complying-with-no-Tiktok-act-on-government-devices-report-finds>).

Nist. 2021. "Improving the Nation's Cybersecurity: NIST's Responsibilities Under the May 2021 Executive Order." *Nist*. Retrieved (<https://www.nist.gov/itl/executive-order-14028-improving-nations-cybersecurity>).

Oladipo, Gloria. 2022. "Facebook Owner Reportedly Paid Republican Firm to Push Message Tiktok Is 'the Real Threat.'" *The Guardian*. Retrieved (<https://www.theguardian.com/technology/2022/mar/30/facebook-owner-reportedly-paid-republican-firm-Tiktok-real-threat>).

Paul, Kari. 2022a. "From Dance Videos to Global Sensation: What You Need to Know about Tiktok's Rise." *The Guardian*. Retrieved (<https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/22/Tiktok-history-rise-algorithm-misinformation>).

Paul, Kari. 2022b. "'We Risk Another Crisis': Tiktok in Danger of Being Major Vector of Election Misinformation." *The Guardian*. Retrieved (<https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/24/Tiktok-election-misinformation-voting-politics>).

Paul, Katie. 2022. "Exclusive: Meta Slashes Hiring Plans, Girds for 'fierce' Headwinds." *Reuters*. Retrieved (<https://www.reuters.com/technology/exclusive-meta-girds-fierce-headwinds-slower-growth-second-half-memo-2022-06-30/>).

- Paulo, Mazzotti. 2024. "The 'Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act' (PAFACAA): 'Tiktok Ban' or New Milestone in US Economic Security Law?" *Celis Institute* 1. Retrieved (<https://www.celis.institute/celis-blog/the-protecting-americans-from-foreign-adversary-controlled-applications-act-pafacaa-Tiktok-ban-or-new-milestone-in-us-economic-security-law-2/>).
- Perault, Matt. 2024. "What Happened to Tiktok's Project Texas?" *Law Fare*. Retrieved (<https://www.lawfaremedia.org/article/what-happened-to-Tiktok-s-project-texas>).
- Perez, Sarah. 2021. "Walmart to Host a New Livestream Shopping Event on Tiktok, Following Successful Pilot." *TechCrunch*. Retrieved (<https://techcrunch.com/2021/03/09/walmart-to-host-a-new-live-stream-shopping-event-on-Tiktok-following-successful-pilot/>).
- Perrett, Connor. 2022. "The 'slap a Teacher' Tiktok Challenge Was Never Real, but Rumors at One High School Started a Nationwide Panic." *Business Insider*. Retrieved (<https://www.businessinsider.com/slap-a-teacher-Tiktok-fake-nationwide-panic-2022-7>).
- Popli, Nik. 2022. "Meta, Tiktok, Dan Twitter Berharap Melawan Misinformasi Pemilu. Para Ahli Mengatakan Rencana Mereka Belum Cukup." *Time*.
- President, The. 2021. "Improving the Nation's Cybersecurity." *Presidential Documents Executive* 86(93):26633–47.
- Press, Associated. 2024a. "Biden Campaign Joins Tiktok, but Administration Still Warns of App's National Security Concerns." *Pbs Newss*.
- Press, Associated. 2024b. "Justice Department Says Tiktok Collected US User Views on Issues like Abortion and Gun Control." *Politico*. Retrieved (<https://www.politico.com/news/2024/07/27/doj-Tiktok-collected-user-views>).
- Price, Emily. 2018. "Musical.ly and Tiktok Are Merging into a Short-Video Powerhouse." *Fast Company* 1. Retrieved (<https://www.fastcompany.com/90212600/musical-ly-and-Tiktok-are-merging-into-a-short-video-powerhouse>).
- Rahmawati, futika ari. 2021. "DINAMIKA MEDIA SOSIAL TIKTOK 2.1." *Hubungan Internasional* 2(2):135–48.
- ravpreet kaur, brand statistics. 2024. "Tiktok Statistics: Usage, Revenue, & Key Facts." *Feeddough*. Retrieved (<https://www.feedough.com/Tiktok-statistics-usage-revenue-key-facts/>).
- Release, Press. 2024a. "Gallagher, Bipartisan Coalition Introduce Legislation to Protect Americans From Foreign Adversary Controlled Applications, Including Tiktok." *Select Committee on the Ccp*. Retrieved (<https://selectcommitteeontheccp.house.gov/media/press-releases/gallagher-bipartisan-coalition-introduce-legislation-protect-americans-0>).
- Release, Press. 2024b. "Rep. Cammack Joins Bipartisan Coalition In Introducing

- Legislation To Protect Americans From Foreign Adversary Controlled Applications, Including Tiktok.” *Cammack.House*. Retrieved (<https://cammack.house.gov/media/press-releases/rep-cammack-joins-bipartisan-coalition-introducing-legislation-protect>).
- Reuters. 2024a. “US Appeals Court Upholds Tiktok Law Forcing Its Sale.” *Aljazeera*.
- Reuters. 2024b. “US Government Says Tiktok Poses Threat to National Security.” *Deutsche Welle*.
- Reuters. 2025. “US Supreme Court Upholds Law Banning Tiktok.” *Reuters*. Retrieved (<https://www.aljazeera.com/economy/2025/1/17/us-supreme-court-upholds-law-banning-Tiktok>).
- Riotta, Chris. 2023. “The White House Will Officially Ban Tiktok From Government Devices Within 30 Days.” *Government Executive*.
- Rodriguez, Katherine. 2021. “What Is the ‘Devious Lick’ Tiktok Trend? What Does It Mean? Here’s What to Know.” *Nj.Com*. Retrieved (<https://www.nj.com/news/2021/09/what-is-the-devious-lick-Tiktok-trend-what-does-it-mean-heres-what-to-know.html>).
- Russell, Jon. 2018. “Short Video Service Musical.ly Is Merging into Sister App Tiktok.” *TechCrunch*. Retrieved (<https://techcrunch.com/2018/08/02/musically-Tiktok/>).
- Saputra, Wyanne Teresita. 2021. “IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN APLIKASI TIKTOK OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HUBUNGAN TIONGKOK DAN AMERIKA SERIKAT DISEKTOR KEAMANAN RUANG SIBER: BYTEDANCE, TIONGKOK.” *FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA*.
- Service, congressional reasearch. 2023. “Tiktok: Recent Data Privacy and National Security Concerns.” *Congressional Research Service*.
- Sheera, Raymond Zhong and. 2020. “A Third of Tiktok’s U.S. Users May Be 14 or Under, Raising Safety Questions.” *The New York Times*. Retrieved (<https://www.nytimes.com/2020/08/14/technology/Tiktok-underage-users-ftc.html>).
- Shepardson, David. 2022. “ByteDance Finds Employees Obtained Tiktok User Data of Two Journalists.” *Routers*. Retrieved (<https://www.reuters.com/technology/bytedance-finds-employees-obtained-Tiktok-user-data-two-us-journalists-2022-12-22/>).
- Sherman, Mark. 2025. “Tiktok Says It Will ‘Go Dark’ Unless It Gets Clarity from Biden Following Supreme Court Ruling.” *Ap News*. Retrieved (<https://apnews.com/article/supreme-court-Tiktok-china-security-speech-166f7c794ee587d3385190f893e52777>).
- Singer, Amy. 2021. “Introducing the YouTube Shorts Fund.” *Blog. Youtube*.
- Sohail, Daniyal. 2022. “YouTube Sees ‘Really Strong Competition’ From China’s Tiktok

- CEO.” *Urdu Point*.

Soros, George. 2022. “Facebook Resorts to Old Smear Tactics against Tiktok.” *Ksat.Com*. Retrieved (<https://www.ksat.com/news/politics/2022/03/30/facebook-resorts-to-old-smear-tactics-against-Tiktok/>).

Sugiono. 2013. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. alfabetawild.

Swanda, Zidan Maulidan. 2023. “Amerika Serikat vs Tiktok: Sebuah Analisis Melalui Perspektif Neorealisme.” *Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga* 1(2):7.

Team, WDSU digital. 2021. “Covington Police: Disabled Teacher Injured in Suspected Tiktok Challenge Assault by Student.” *WDSU News*. Retrieved (<https://www.wdsu.com/article/covington-police-teacher-student-injured-tik-tok-challenge/37895519>).

Wæver, Ole. 2002. “Securitization and Desecuritization.” *Journal on Security* 1–31.

Walker, Liana. 2024. “Joe Biden Has Signed Legislation Banning Tiktok, so What Happens Now.” *Abc. Net*. Retrieved (<https://www.abc.net.au/news/2024-04-25/joe-biden-signs-legislation-banning-tik-tok-explained/103769240>).

Walker, Peter. 2020. “Walmart Buys 7.5% Share in New Tiktok US Entity.” *Retail System*. Retrieved (https://www.retail-systems.com/rs/Walmart_Invests_Tiktok_Global_New_Company_US.php).

walmart. 2020. “Walmart Statement About Potential Investment in and Commercial Agreements with Tiktok Global.” *Walmart*.

Walmart. 2024. “How We’re Bringing the Power of Walmart Connect to Tiktok.” *Walmart*. Retrieved (<https://www.walmartconnect.com/bringing-the-power-of-walmart-connect-to-Tiktok>).

Waltz, Kenneth N. 1959. *Man, the State, and War*.

Williams, Robert. 2022. “How YouTube’s Brewing Tiktok Rivalry Could Impact Mobile Video Strategies.” *Marketing Dave*. Retrieved (<https://www.marketingdive.com/news/how-youtubes-brewing-Tiktok-rivalry-could-impact-mobile-video-strategies/625854/>).

Wire, Bussines. 2023. “Social Media Victims Law Center Sues ByteDance and Tiktok in the Death of 16-Year-Old Chase Nasca; Parents Travel to Washington D.C. to Hear Congressional Testimony of Tiktok CEO.” *Bussines Wire*. Retrieved (<https://www.businesswire.com/news/home/20230321005908/en/Social-Media-Victims-Law-Center-Sues-ByteDance-and-Tiktok-in-the-Death-of-16-Year-Old-Chase-Nasca-Parents-Travel-to-Washington-D.C.-to-Hear-Congressional-Testimony-of-Tiktok-CEO>).

Young, Shalanda D. 2023. “MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE

DEPARTMENTS.” *Research in International Economics by Federal Agencies*. doi: 10.7312/schw92626-011.

Zealand, New, Homeland Security, Attorney General, U. S. Trade, and Arab Emirates. 2025. “Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).” *Congressional Reaserch Service*.